



LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKIP)

BNNP JAWA TIMUR

T.A. 2022



Jl. RAYA
SUKOMANUNGGAL NO
55-56, SURABAYA



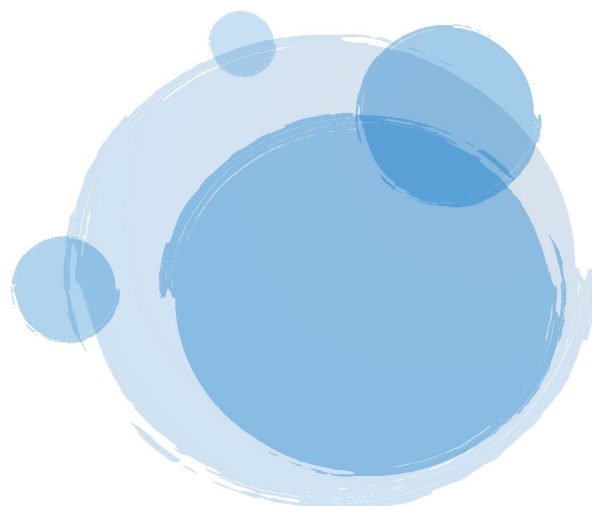
(031) 99143279



bnp_jatim@bnn.go.id



jatim.bnn.go.id



KATA PENGANTAR



uji syukur kami panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, atas berkat dan rahmat-Nya, sehingga penyusunan Laporan Kinerja Badan Narkotika Nasional Provinsi Jawa Timur Tahun 2022 dapat diselesaikan sesuai dengan target waktu yang ditentukan.

Laporan Kinerja ini menyajikan hasil capaian kinerja sebagai perwujudan kewajiban untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan misi instansi dalam mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan pada awal tahun anggaran yang diukur dengan beberapa indikator kegiatan. Tujuan utama akuntabilitas kinerja adalah meningkatkan akuntabilitas publik instansi pemerintah dan meningkatkan efisiensi, efektivitas dan produktivitas kinerja organisasi pemerintah serta meminimalkan peluang terciptanya korupsi, kolusi, dan nepotisme.

Laporan Kinerja ini merangkum semua pelaksanaan kegiatan P4GN di Jawa Timur, terkhusus di BNNP dan BNNK jajarannya. Secara umum, beberapa sasaran dan target dapat tercapai, bahkan ada beberapa yang over prestasi / melebihi target bukan hanya output tetapi menghasilkan outcome juga. Diharapkan kendala dan hambatan yang muncul di T.A. 2022 akan menjadi pembelajaran untuk tahun kedepannya.

Akhirnya kami berharap semoga Laporan Kinerja BNNP Jawa Timur Tahun 2022 dapat menjadi media pertanggungjawaban dan juga menjadi media evaluasi untuk menilai kinerja BNNP Jawa Timur secara keseluruhan.

Demikian laporan ini kami sampaikan, semoga Tuhan Yang Maha Kuasa memberkati usaha kita semua. Amin



Kepala BNNP Jawa Timur

Drs. Mohamad Aris Purnomo

EXECUTIVE SUMMARY

(IKHTISAR EKSEKUTIF)

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Badan Narkotika Nasional Provinsi Jawa Timur Tahun 2022 disusun sebagai wujud nyata komitmen antara penerima dan pemberi amanah untuk meningkatkan integritas, akuntabilitas, transparansi, dan kinerja yang diwujudkan dalam bentuk sasaran strategis dan indikator kinerja yang disertai dengan target kinerja. Penetapan Kinerja 2022 BNNP Jawa Timur mengacu pada sasaran Rencana Strategis (Renstra) BNN yaitu Meningkatnya penanganan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba dan Terwujudnya manajemen organisasi yang professional, produktif, dan proporsional serta berkinerja tinggi. Sasaran Kinerja pada BNNP Jawa Timur yaitu meningkatnya pelaksanaan pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba secara efektif di Jawa Timur yang dibagi atas capaian pada tiap indikator kinerja sebagai berikut :

1. Jumlah kabupaten/kota dengan Indeks Ketahanan Diri Remaja Terhadap Penyalahgunaan Narkoba berkategori “Tinggi” di wilayah provinsi
2. Jumlah kabupaten/kota dengan Indeks Ketahanan Keluarga Terhadap Penyalahgunaan Narkoba berkategori “Tinggi” di wilayah provinsi
3. Jumlah kabupaten/kota dengan Indeks Kemandirian Partisipasi berkategori “Mandiri” di wilayah provinsi
4. Jumlah kawasan rawan di wilayah provinsi yang beralih status dari "Bahaya" menjadi "Waspada"
5. Nilai Keterpulihan Kawasan Rawan Yang diintervensi
6. Jumlah petugas penyelenggara layanan IBM yang terlatih
7. Jumlah petugas Rehabilitasi yang tersertifikasi kompetensi teknis
8. Jumlah lembaga rehabilitasi yang memenuhi Standar Pelayanan Minimal (SPM) di wilayah provinsi
9. Jumlah unit penyelenggara layanan rehabilitasi Intervensi Berbasis Masyarakat (IBM) di wilayah provinsi
10. Indeks kepuasan layanan klinik rehabilitasi BNN Provinsi Jawa Timur
11. Jumlah jaringan peredaran gelap narkoba dan prekursor narkoba yang berhasil dipetakan
12. Jumlah berkas perkara tindak pidana narkoba dan prekursor narkoba yang P-21
13. Jumlah titik lahan tanaman ganja dan tanaman terlarang lainnya yang dimusnahkan

14. Nilai tingkat keamanan, ketertiban, dan kesehatan tahanan
15. Nilai tingkat keamanan barang bukti narkoba dan non narkoba
16. Jumlah berkas perkara tindak pidana pencucian uang hasil tindak pidana narkoba dan prekursor narkoba yang P-21
17. Nilai Kinerja Anggaran BNN Provinsi Jawa Timur
18. Jumlah BNN Kabupaten/ Kota di wilayah provinsi dengan Nilai Kinerja Anggaran mencapai target
19. Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) BNN Provinsi Jawa Timur
20. Jumlah BNN Kabupaten/ Kota di wilayah provinsi dengan Nilai IKPA mencapai target

Secara umum BNNP Jawa Timur beserta BNNK jajaran mampu mencapai tujuan dan sasaran kegiatan yang telah ditetapkan, terutama pada kegiatan Pencegahan dan Pemberdayaan Masyarakat. Ini dapat dilihat pada :

- a. Jumlah Kabupaten/kota dengan Indeks Ketahanan Diri Remaja Terhadap Penyalahgunaan Narkoba Berkategori ‘Tinggi’ di wilayah Provinsi, dengan target 17 (tujuh belas) kabupaten/kota, tercapai 13 (tiga belas) kabupaten/kota.
- b. Jumlah kabupaten/kota dengan Indeks Ketahanan Keluarga Terhadap Penyalahgunaan Narkoba berkategori ‘Tinggi’ di wilayah provinsi dengan target 17 (tujuh belas) kabupaten/kota terealisasi 16 (enam belas) kabupaten/kota
- c. Jumlah kabupaten/kota dengan Indeks Kemandirian Partisipasi berkategori “Mandiri” di wilayah provinsi dengan target 17 (tujuh belas) kabupaten/kota dengan realisasi 17 (tujuh belas) kabupaten/kota.
- d. Jumlah kawasan rawan di wilayah provinsi yang beralih status dari ‘Bahaya’ menjadi “Waspada” dengan target 2 (tiga) kawasan terealisasi 2 (tiga) kawasan.
- e. Nilai Keterpulihan Kawasan Rawan yang diintervensi dengan target 2.75 terealisasi 3.05 di Kabupaten Malang dan 2.45 di Kota Malang (BNNP).
- f. Jumlah petugas penyelenggara IBM yang terlatih dengan target 94 orang terealisasi 115 orang.
- g. Jumlah petugas rehabilitasi yang tersertifikasi kompetensi teknis dengan target 5 (lima) orang terealisasi 10 (sepuluh) orang.

- h. Jumlah lembaga rehabilitasi yang memenuhi Standar Pelayanan Minimal (SPM) di wilayah provinsi dengan target 10 (sepuluh) lembaga dapat terealisasi 12 (dua belas) lembaga.
- i. Jumlah unit penyelenggara layanan rehabilitasi intervensi Berbasis Masyarakat (IBM) di wilayah provinsi dengan target 19 (sembilan belas) unit terealisasi 22 (dua puluh dua) unit.
- j. Indeks kepuasan layanan Klinik rehabilitasi BNN Provinsi Jawa Timur dengan target 3.2 realisasi 3.707
- k. Jumlah jaringan peredaran gelap narkoba dan precursor narkoba yang berhasil dipetakan dengan target 3 peta jaringan realisasi 4 peta jaringan.
- l. Jumlah berkas perkara tindak pidana narkoba dan precursor narkoba yang P-21 dengan target 25 (dua puluh lima) berkas dengan realisasi 71 (tujuh puluh satu) berkas.
- m. Nilai tingkat keamanan, ketertiban, dan kesehatan tahanan terpenuhi target 100.
- n. Nilai Tingkat Keamanan Barang Bukti Narkoba dan Non Narkoba terpenuhi target 100.
- o. Jumlah berkas perkara tindak pidana pencucian uang hasil tindak pidana narkoba dan prekursor narkoba yang P-21 dengan target 1 (satu) berkas tidak tercapai pada T.A. 2022, karena masih dalam proses.
- p. Nilai Kinerja Anggaran BNNP Jawa Timur dengan target nilai 87 terealisasi 87,42
- q. Jumlah BNN Kabupaten/Kota di wilayah provinsi dengan Nilai Kinerja Anggaran mencapai target, dengan target 17 kabupaten/kota dan ada 9 (Sembilan) satker yang mencapai target indeks 87
- r. Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) BNN Provinsi Jawa Timur dengan target nilai 95 tercapai 97,46
- s. Jumlah BNN Kabupaten/Kota di wilayah provinsi dengan Nilai IKPA mencapai target 17 kabupaten /kota yang terealisasi 16 kabupaten/kota mencapai target nilai 95

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
IKHTISAR EKSEKUTIF	ii
DAFTAR ISI	v
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Dasar Hukum	3
C. Kedudukan, Tugas, Fungsi dan Kewenangan	3
D. Struktur Organisasi	5
E. Sistematika Penyajian	6
 BAB II PERENCANAAN KINERJA	
A. Rencana Strategis.....	8
B. Penetapan Kinerja BNN Provinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2022	10
 BAB III AKUNTABILITAS KINERJA BNNP JAWA TIMUR	
A. Capaian Kinerja Organisasi Tahun 2022.....	13
B. Realisasi Anggaran Tahun 2022.....	56
 BAB IV PENUTUP	57
LAMPIRAN Perjanjian Kinerja	

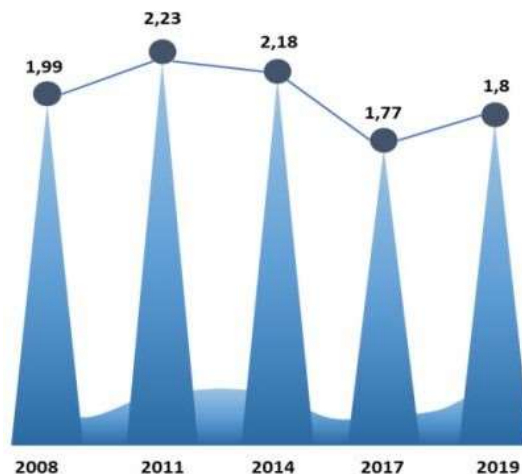
BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Gambaran kondisi umum, potensi, dan permasalahan pembangunan P4GN dipaparkan berdasarkan dari hasil pencapaian program periode sebelumnya, kondisi lingkungan strategis, dan perkembangan baru lainnya. Potensi dan permasalahan pembangunan P4GN akan menjadi input dalam menentukan arah kebijakan dan strategi BNN Provinsi Jawa Timur pada periode 2020-2024. Pada perkembangannya, kejahatan narkoba yang bermutasi dengan kejahatan lainnya menyebabkan kerugian sosial ekonomi secara material diperkirakan mencapai sebesar 84,6 Triliun Rupiah per tahunnya.

Kinerja pencegahan dan pemberantasan terhadap kejahatan dan pelanggaran hukum baik berupa kejahatan penyalahgunaan maupun kejahatan peredaran gelap narkoba, sebagaimana menjadi mandat konstitusional keberadaan BNN, merupakan perwujudan kehadiran negara dalam memberikan perlindungan terhadap warga negaranya untuk tidak menjadi korban dan pelaku kejahatan narkoba. Dalam kaitan tersebut, kinerja BNN akan selalu dihubungkan dengan angka prevalensi penyalahgunaan narkoba yang menunjukkan atau menggambarkan situasi penyalahgunaan narkoba yang sedang terjadi saat ini. Berdasarkan survei prevalensi yang telah dilakukan, diperoleh hasil yang menunjukkan bahwa prevalensi cenderung fluktuatif dan khusus laju angka prevalensi 1 (satu) tahun terakhir mengalami peningkatan, sebagaimana disajikan dalam gambar berikut:



Gambar 1. Angka Prevalensi Penyalahgunaan Narkotika di Indonesia

Sumber : Hasil Survey BNN RI (Renstra BNN RI)

Dari data tersebut, angka prevalensi dalam bingkai periode pembangunan lima (5) tahunan mengalami kecenderungan menurun, namun pada tahun 2019 mengalami peningkatan 0,03%. Kondisi tersebut menjadi basis tuntutan untuk terus memperbaiki capaian kinerja BNN secara institusional sekaligus keluar dari kondisi dan status yang dilabeli sebagai situasi “darurat narkoba”.

Secara obyektif, Indonesia melalui berbagai institusi dengan BNN sebagai *Leading Sector* masih harus bekerja keras untuk benar-benar keluar dari kondisi darurat tersebut. Penanganan tersebut harus benar-benar tepat agar konfigurasi penyalahgunaan narkoba kalangan coba pakai tidak terus membesar pada satu sisi dan pada sisi yang lain juga tidak berkembang menjadi pecandu. Dalam hal ini, penyalahgunaan narkoba coba pakai harus secara tepat mendapat penanganan agar menekan perkembangannya.

BNN Provinsi Jawa Timur melakukan Program Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN) dengan berbagai kegiatan melalui Bidang Pencegahan, Bidang Pemberdayaan Masyarakat, dan Bidang Pemberantasan. Melalui bidang tersebut BNN bersinergi dengan seluruh elemen/ komponen bangsa untuk melakukan perlawanan terhadap kejahatan Narkoba.

Bidang Pencegahan dan pemberdayaan Masyarakat (P2M) melakukan kegiatan Desiminasi Informasi P4G, Advokasi, dan Pemberdayaan Peran serta masyarakat. Bidang Rehabilitasi melakukan kegiatan pelaksanaan rehabilitasi

penyalahgunaan Narkoba. Sedangkan Bidang Pemberantasan melakukan Pelaksanaan Penyidikan dan penyelidikan jaringan peredaran gelap narkoba serta pengawasan tahanan dan barang bukti narkoba.

Sementara itu untuk meningkatkan perhatian seluruh penyelenggara negara terhadap ancaman bahaya penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkoba, pemerintah telah mengeluarkan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 6 Tahun 2019 tentang Pelaksanaan Kebijakan dan Strategi Nasional di Bidang Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN) Tahun 2019-2024. Melalui Inpres ini menjadi dasar hukum bagi seluruh penyelenggara negara untuk menyusun Rencana Aksi P4GN di lingkungan instansi masing-masing. Untuk hal tersebut, BNN telah memfasilitasi penyusunan Rencana Aksi baik untuk Instansi Pemerintah Pusat maupun untuk Pemerintah Daerah. Filosofi penetapan Inpres tersebut adalah perlunya kebersamaan seluruh komponen masyarakat bangsadan negara melakukan pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba agar permasalahan tersebut dapat segera dituntaskan.

Dalam Inpres tersebut, BNN ditugaskan untuk menjadi penjuror guna mengkoordinir laporan realisasi Rencana Aksi dari seluruh Kementerian/ Lembaga baik di Pusat maupun di daerah untuk dilaporkan secara berkala ke Presiden. BNN Provinsi Jawa Timur yang merupakan perpanjangan dari BNN RI, wilayah kerjanya mencakup wilayah hukum dan wilayah geografis Provinsi Jawa Timur, BNN Provinsi Jawa Timur resmi menjadi Lembaga Negara yang Vertikal sejak 2011. BNNP berlokasi di Jl. Raya Sukomanunggal No. 55-56, Surabaya

B. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
3. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 214 Tahun 2017 tentang Pengukuran dan Evaluasi Kinerja atas Pelaksanaan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian/Lembaga;
4. Permenpan dan RB Nomor 53 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
5. Keputusan Kepala BNN Nomor KEP/388/XII/2015/BNN Tahun 2015 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penyusunan Laporan Kinerja di Lingkungan BNN, BNNP, dan BNNK/Kota.

C. Kedudukan, Tugas, Fungsi dan Kewenangan

1. Kedudukan

Badan Narkotika Nasional Provinsi Jawa Timur merupakan instansi vertikal Badan Narkotika Nasional yang melaksanakan tugas, fungsi, dan wewenang Badan Narkotika Nasional dalam wilayah Provinsi Jawa Timur. BNNP Jawa Timur berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan Narkotika Nasional.

2. Tugas

Badan Narkotika Nasional Provinsi Jawa Timur mempunyai tugas melaksanakan tugas, fungsi dan wewenang Badan Narkotika Nasional dalam wilayah Provinsi Jawa Timur. Tugas Badan Narkotika Nasional sebagaimana diatur dalam Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional Nomor 16 Tahun 2014, meliputi :

- a. Menyusun dan melaksanakan kebijakan nasional mengenai pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika;
- b. Mencegah dan memberantas penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika;
- c. Berkoordinasi dengan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika;
- d. Meningkatkan kemampuan lembaga rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial pecandu Narkotika, baik yang diselenggarakan oleh pemerintah maupun masyarakat;
- e. Memberdayakan masyarakat dalam pencegahan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika;
- f. Memantau, mengarahkan, dan meningkatkan kegiatan masyarakat dalam pencegahan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika;
- g. Melakukan kerjasama bilateral dan multilateral, baik regional maupun internasional, guna mencegah dan memberantas peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika;
- h. Mengembangkan laboratorium Narkotika dan Prekursor Narkotika;
- i. Melaksanakan administrasi penyelidikan dan penyidikan terhadap perkara penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika; dan
- j. Membuat laporan tahunan mengenai pelaksanaan tugas dan wewenang.

Selain tugas sebagaimana dimaksud, BNN juga bertugas menyusun dan melaksanakan kebijakan nasional mengenai pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap psikotropika, prekursor, dan bahan adiktif lainnya kecuali bahan adiktif untuk tembakau dan alkohol.

3. Fungsi

Dalam melaksanakan tugas dimaksud Badan Narkotika Nasional Provinsi Jawa Timur menyelenggarakan fungsi:

- a. Pelaksanaan kebijakan teknis P4GN di bidang pencegahan dan pemberdayaan masyarakat, pemberantasan, dan rehabilitasi;
- b. Pelaksanaan penyiapan bantuan hukum dan kerja sama;

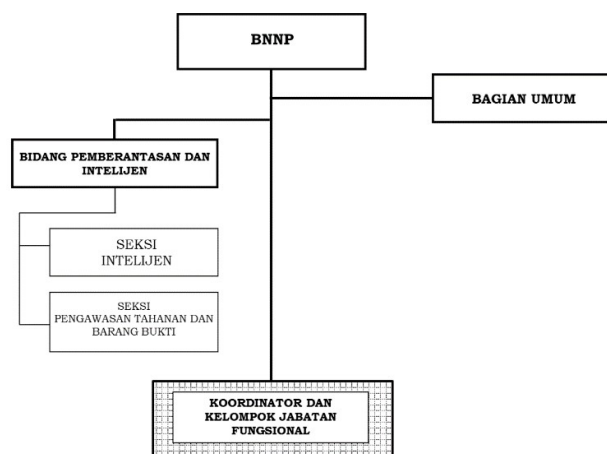
- c. Pelaksanaan pembinaan teknis di bidang P4GN kepada Badan Narkotika Nasional Kabupaten/Kota;
- d. Penyusunan rencana program dan anggaran BNNP;
- e. Evaluasi dan penyusunan laporan BNNP; dan
- f. Pelayanan administrasi.

4. Kewenangan

Dalam menjalankan tugas dan fungsi sebagaimana diatur dalam Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional Nomor 16 Tahun 2014, Kewenangan Badan Narkotika Nasional Provinsi Jawa Timur pada dasarnya adalah melaksanakan kewenangan Badan Narkotika Nasional yaitu melakukan penyelidikan dan penyidikan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika.

D. Struktur Organisasi

Berdasarkan Surat Menteri Pan&RB Nomor B/879/M.KT.01/2020 tanggal 16 Juli 2020 perihal Penyederhanaan Birokrasi di Lingkungan BNN yang kemudian disahkannya Peraturan Badan Narkotika Nomor 6 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Narkotika Nasional Provinsi dan Badan Narkotika Nasional Kabupaten/Kota, sehingga struktur organisasi BNNP Jawa Timur menjadi :



E. Sistematika

Laporan Kinerja Badan Narkotika Nasional Provinsi Jawa Timur ini disusun dengan sistematika sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan.

Pada bab ini berisi tentang latar belakang dengan penekanan kepada aspek strategis organisasi serta permasalahan utama (*Strategic Issued*) yang sedang dihadapi organisasi, maksud dan tujuan, ruang lingkup dan sistematika penyajian.

Bab II Perencanaan Kinerja.

Pada bab ini berisi tentang uraian ringkasan/ikhtisar perjanjian kinerja pada tahun 2022.

Bab III Akuntabilitas Kinerja.

Pada bab ini berisi tentang capaian kinerja organisasi untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis organisasi sesuai dengan hasil pengukuran kinerja organisasi.

Bab IV Penutup.

Pada bab ini berisi simpulan umum atas capaian kinerja organisasi serta langkah di masa datang yang akan dilakukan organisasi untuk meningkatkan kinerjanya.

Lampiran-Lampiran.

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

A. Rencana Strategis

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) mengamanatkan bahwa setiap kementerian/lembaga perlu menyusun Rencana Strategis (Renstra) yang mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN). Penyusunan Renstra dilaksanakan melalui pendekatan proses teknokratik, politik, partisipatif, top down, dan bottom up, dengan pendekatan substansial yang holistik, integratif, tematik, dan spasial (HITS). Dokumen Renstra menjadi dasar bagi gerak strategis dan operasional BNN sebagai LPNK dalam menangani isu nasional dan sekaligus mewujudkan tujuan dan sasaran pembangunan nasional dalam penanganan dan penanggulangan permasalahan narkoba.

Dalam penyusunan visi dan misi Tahun 2020-2024, BNN berpedoman atau mengacu pada visi dan misi presiden terpilih periode 2020-2024, yaitu ***“Terwujudnya Indonesia maju yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian, berlandaskan gotong royong”***.

Kepala BNN telah menetapkan visi BNN, yaitu:

“Mewujudkan masyarakat yang terlindungi dan terselamatkan dari kejahatan narkoba dalam rangka menuju Indonesia maju yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian berlandaskan gotong royong”

Dalam rangka pencapaian visi, BNN juga memperbaharui misinya agar mencerminkan kegiatan inti dan mandatnya dengan lebih baik. Misi BNN yaitu:

- 1. Memberantas Peredaran Gelap dan Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba secara Profesional;**
- 2. Meningkatkan Kemampuan Lembaga Rehabilitasi dan Pemberdayaan Ketahanan Masyarakat terhadap Kejahatan Narkoba;**
- 3. Mengembangkan dan Memperkuat Kapasitas Kelembagaan.**

Penyusunan Perjanjian Kinerja (PK) merupakan mata rantai kegiatan penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Perjanjian kinerja merupakan wujud komitmen penerima amanah dan kesepakatan antara penerima dan pemberi amanah atas kinerja terukur tertentu berdasarkan tugas, fungsi, dan wewenang serta sumber daya yang tersedia. PK menjadi dasar bagi penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran setiap unit organisasi dan dasar penetapan bagi sasaran kinerja pegawai. Oleh karenanya, PK dapat menjadi instrumen dalam penentuan pemberian penghargaan ataupun sanksi.

Berdasarkan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja Dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, Perjanjian kinerja adalah lembar/dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja.

Melalui perjanjian kinerja, terwujudlah komitmen penerima amanah dan kesepakatan antara penerima dan pemberi amanah atas kinerja terukur tertentu

berdasarkan tugas, fungsi dan wewenang serta sumber daya yang tersedia. Kinerja yang disepakati tidak dibatasi pada kinerja yang dihasilkan atas kegiatan tahun bersangkutan, tetapi termasuk kinerja (*outcome*) yang seharusnya terwujud akibat kegiatan tahun-tahun sebelumnya. Dengan demikian target kinerja yang diperjanjikan juga mencakup *outcome* yang dihasilkan dari kegiatan tahun-tahun sebelumnya,

Berdasarkan Perjanjian Kinerja yang telah disepakati antara Kepala Badan Narkotika Nasional dengan Kepala Badan Narkotika Nasional Provinsi Jawa Timur, maka Perjanjian Kinerja Badan Narkotika Nasional Provinsi Jawa Timur adalah sebagai berikut:

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022

Unit Organisasi Eselon II : BNNP Jawa Timur
Tahun Anggaran : 2022

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	T a r g e t
1	2	3	4
1	Meningkatnya daya tangkal anak dan remaja terhadap pengaruh buruk penyalahgunaan	Jumlah kabupaten/kota dengan Indeks Ketahanan Diri Remaja Terhadap Penyalahgunaan Narkoba berkategori "Tinggi" di wilayah provinsi	17 Kabupaten/Kota

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	T a r g e t
1	2	3	4
	dan peredaran gelap narkoba		
2	Meningkatnya daya tangkal keluarga terhadap pengaruh buruk penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba	Jumlah kabupaten/kota dengan Indeks Ketahanan Keluarga Terhadap Penyalahgunaan Narkoba berkategori "Tinggi" di wilayah provinsi	17 Kabupaten/Kota
3	Meningkatnya kesadaran dan kepedulian masyarakat dalam penanganan P4GN	Jumlah kabupaten/kota dengan Indeks Kemandirian Partisipasi berkategori "Mandiri" di wilayah provinsi	17 Kabupaten/Kota
4	Meningkatnya upaya pemulihan kawasan atau wilayah rawan narkoba secara berkelanjutan	Jumlah kawasan rawan di wilayah provinsi yang beralih status dari "Bahaya" menjadi "Waspada"	2 Kawasan
		Nilai Keterpulihan Kawasan Rawan Yang diintervensi	2.75
5	Meningkatnya kapasitas tenaga teknis rehabilitasi	Jumlah petugas penyelenggara layanan IBM yang terlatih	94 Orang
		Jumlah petugas Rehabilitasi yang tersertifikasi kompetensi teknis	5 Orang
6	Meningkatnya aksesibilitas dan kemampuan fasilitas layanan rehabilitasi narkoba	Jumlah lembaga rehabilitasi yang memenuhi Standar Pelayanan Minimal (SPM) di wilayah provinsi	10 Lembaga
		Jumlah unit penyelenggara layanan rehabilitasi Intervensi Berbasis Masyarakat (IBM) di wilayah provinsi	19 Unit
7	Meningkatnya kualitas layanan rehabilitasi	Indeks kepuasan layanan klinik rehabilitasi BNN Provinsi Jawa Timur	3,4

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	T a r g e t
1	2	3	4
	narkotika di Klinik Rehabilitasi		
8	Meningkatnya pemetaan jaringan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika	Jumlah jaringan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika yang berhasil dipetakan	1 Peta Jaringan
9	Meningkatnya pengungkapan tindak pidana narkotika dan lahan tanaman ganja dan tanaman terlarang lainnya	Jumlah berkas perkara tindak pidana narkotika dan prekursor narkotika yang P-21	25 Berkas
		Jumlah titik lahan tanaman ganja dan tanaman terlarang lainnya yang dimusnahkan	-
10	Meningkatnya pengawasan tahanan dan barang bukti narkotika	Nilai tingkat keamanan, ketertiban, dan kesehatan tahanan	100 indeks
		Nilai tingkat keamanan barang bukti narkotika dan non narkotika	100 indeks
11	Meningkatnya pengungkapan kasus pencucian uang hasil tindak pidana narkotika dan prekursor narkotika	Jumlah berkas perkara tindak pidana pencucian uang hasil tindak pidana narkotika dan prekursor narkotika yang P-21	1 Berkas Perkara
12	Meningkatnya proses manajemen kinerja secara efektif dan efisien	Nilai Kinerja Anggaran BNN Provinsi Jawa Timur	87 indeks
		Jumlah BNN Kabupaten/ Kota di wilayah provinsi dengan Nilai Kinerja Anggaran mencapai target	17 Kabupaten/ Kota
13	Meningkatnya tata kelola administrasi	Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) BNN Provinsi Jawa Timur	95 indeks

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	T a r g e t
1	2	3	4
	keuangan yang sesuai prosedur	Jumlah BNN Kabupaten/ Kota di wilayah provinsi dengan Nilai IKPA mencapai target	17 Kabupaten/ Kota

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

A. Capaian Kinerja Organisasi

Badan Narkotika Nasional Provinsi Jawa Timur dalam melaksanakan Program Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN) dan kegiatan untuk mencapai kinerja, melakukan berbagai upaya yaitu melalui perbaikan sistem manajemen organisasi dan manajemen perencanaan.

Pada Tahun 2022 BNNP Jawa Timur telah menetapkan Perjanjian Kinerja sebanyak 13 (tiga belas) sasaran kinerja, dengan indikator kinerja sebanyak 20 (dua puluh)

indikator kinerja. Tabel berikut dijelaskan realiasi dari capaian target sasaran kinerja tahun 2022, sebagai berikut:

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	T a r g e t	Realisasi
1	2	3	4	5
1	Meningkatnya daya tangkal anak dan remaja terhadap pengaruh buruk penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika	Jumlah kabupaten/kota dengan Indeks Ketahanan Diri Remaja Terhadap Penyalahgunaan Narkoba berkategori "Tinggi" di wilayah provinsi	17 Kabupaten/Kota	13 Kabupaten/Kota
2	Meningkatnya daya tangkal keluarga terhadap pengaruh buruk penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika	Jumlah kabupaten/kota dengan Indeks Ketahanan Keluarga Terhadap Penyalahgunaan Narkoba berkategori "Tinggi" di wilayah provinsi	17 Kabupaten/Kota	16 Kabupaten/Kota
3	Meningkatnya kesadaran dan kepedulian masyarakat dalam penanganan P4GN	Jumlah kabupaten/kota dengan Indeks Kemandirian Partisipasi berkategori "Mandiri" di wilayah provinsi	17 Kabupaten/Kota	17 Kabupaten/Kota
4	Meningkatnya upaya pemulihan kawasan atau wilayah rawan narkoba secara berkelanjutan	Jumlah kawasan rawan di wilayah provinsi yang beralih status dari "Bahaya" menjadi "Waspada"	2 Kawasan	2 Kawasan (Kel. Sukun Kota Malang dan Desa Ngadilangkung Kabupaten Malang)
		Nilai Keterpulihan Kawasan Rawan Yang diintervensi	2.75 indeks	Kel Sukun : 2.45 Ds. Ngadilangkung: 3.05

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	T a r g e t	Realisasi
1	2	3	4	5
5	Meningkatnya kapasitas tenaga teknis rehabilitasi	Jumlah petugas penyelenggara layanan IBM yang terlatih	94 Orang	115 Orang
		Jumlah petugas Rehabilitasi yang tersertifikasi kompetensi teknis	5 Orang	10 Orang
6	Meningkatnya aksesibilitas dan kemampuan fasilitas layanan rehabilitasi narkotika	Jumlah lembaga rehabilitasi yang memenuhi Standar Pelayanan Minimal (SPM) di wilayah provinsi	10 Lembaga	12 Lembaga
		Jumlah unit penyelenggara layanan rehabilitasi Intervensi Berbasis Masyarakat (IBM) di wilayah provinsi	19 Unit	22 Unit
7	Meningkatnya kualitas layanan rehabilitasi narkotika di Klinik Rehabilitasi	Indeks kepuasan layanan klinik rehabilitasi BNN Provinsi Jawa Timur	3,40 indeks	3.707
8	Meningkatnya pemetaan jaringan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika	Jumlah jaringan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika yang berhasil dipetakan	3 Peta Jaringan	4 Peta Jaringan
9	Meningkatnya pengungkapan tindak pidana narkotika dan lahan tanaman ganja dan tanaman terlarang lainnya	Jumlah berkas perkara tindak pidana narkotika dan prekursor narkotika yang P-21	25 Berkas	71 Berkas
		Jumlah titik lahan tanaman ganja dan tanaman terlarang lainnya yang dimusnahkan	-	
10	Meningkatnya pengawasan tahanan dan	Nilai tingkat keamanan, ketertiban, dan kesehatan tahanan	100 indeks	100

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	T a r g e t	Realisasi
1	2	3	4	5
	barang bukti narkotika	Nilai tingkat keamanan barang bukti narkotika dan non narkotika	100 indeks	100
11	Meningkatnya pengungkapan kasus pencucian uang hasil tindak pidana narkotika dan prekursor narkotika	Jumlah berkas perkara tindak pidana pencucian uang hasil tindak pidana narkotika dan prekursor narkotika yang P-21	1 Berkas	0 Berkas
12	Meningkatnya proses manajemen kinerja secara efektif dan efisien	Nilai Kinerja Anggaran BNN Provinsi Jawa Timur	87 indeks	87.42
		Jumlah BNN Kabupaten/ Kota di wilayah provinsi dengan Nilai Kinerja Anggaran mencapai target	17 BNN Kabupaten/ Kota	9 BNN Kabupaten/Kota
13	Meningkatnya tata kelola administrasi keuangan yang sesuai prosedur	Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) BNN Provinsi Jawa Timur	95 indeks	97.46
		Jumlah BNN Kabupaten/ Kota di wilayah provinsi dengan Nilai IKPA mencapai target	17 BNN Kabupaten/ Kota	16 BNN Kabupaten/Kota

Adapun rincian perjanjian kinerja yang terdiri dari 13 (tiga belas) sasaran kegiatan dan 20 (dua puluh) indikator kinerja kegiatan (IKK) sebagai berikut:

1.	Sasaran : Meningkatkan daya tangkal anak dan remaja terhadap pengaruh buruk penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika
----	---

N O	INDIKATOR KERJA	TARGET	REALISASI	%
--------	-----------------	--------	-----------	---

1	Jumlah Kabupaten/Kota dengan Indeks Ketahanan Diri Remaja Terhadap Penyalahgunaan Narkoba berkategori “Tinggi” di wilayah Provinsi dengan nilai indeks minimal 52.00	17	13	76 %
----------	---	-----------	-----------	-------------

DEFINISI OPERASIONAL

Indeks Ketahanan Diri Remaja adalah pengukuran ketahanan diri anti narkoba pada remaja sebagai kemampuan remaja untuk mengendalikan diri, menghindari dari, dan menolak segala bentuk penyalahgunaan narkoba. Nilai ketahanan diri remaja dapat diperoleh dari kegiatan Informasi dan Edukasi melalui media konvensional (penyuluhan anti narkoba, kegiatan pelatihan pengembangan softskill dan Pembentukan Remaja Teman Sebaya anti Narkotika melalui dialog interaktif). Pelatihan pengembangan softskill adalah untuk memberikan pemahaman serta mengembangkan kemampuan yang aplikatif kepada sekolah dalam menciptakan siswa yang adaptif dalam menolak penyalahgunaan narkoba. Manfaat dilaksanakannya pengembangan softskill agar siswa memiliki kesiapan untuk bersih dari narkoba, menumbuhkan kepercayaan diri dalam bersosialisasi sehingga akan memperkuat citra positif siswa. Pembentukan Remaja Teman Sebaya Anti Narkotika melalui dialog interaktif remaja ini adalah untuk memberikan pemahaman serta mengembangkan kemampuan yang aplikatif kepada remaja dalam menciptakan hubungan pertemanan yang adaptif dalam menolak penyalahgunaan narkoba.

METODE PENGUKURAN

Pengukuran Indeks Ketahanan Diri Anti Narkoba pada tahun 2017 telah dilaksanakan oleh Biro Perencanaan Setdema BNN dengan nama kegiatan penyusunan dan pengujian alat ukur ketahanan diri anti narkoba (*Anti Drugs Scale/ADS*). Alat ukur ADS ini terdiri dari 3 (tiga) dimensi, yaitu *self regulation*, *assertiveness* dan *reachingout* yang dapat dipergunakan untuk mengetahui kemampuan individu dalam menghadapi dorongan, keinginan, atau pengaruh untuk menyalahgunakan narkoba. Berikut nilai Indeks Ketahanan Diri Remaja Terhadap Penyalahgunaan Narkoba di wilayah Provinsi Jawa Timur :

NO	SATKER	NILAI DEKTARI 2021	NILAI DEKTARI 2022	KATEGORI	KET
1	BNNP Jawa Timur	48.56	55.71	Sangat Tinggi	Tercapai
2	BNN Kabupaten Sumenep	48.96	54.74	Sangat Tinggi	Tercapai
3	BNN Kota Mojokerto	49.72	51.46	Tinggi	Tidak Tercapai
4	BNN Kota Malang	56.44	56.32	Sangat Tinggi	Tercapai

5	BNN Kota Batu	52.61	52.52	Tinggi	Tercapai
6	BNN Kabupaten Tulungagung	49.76	54.09	Sangat Tinggi	Tercapai
7	BNN Kabupaten Nganjuk	50.23	56.89	Sangat Tinggi	Tercapai
8	BNN Kabupaten Sidoarjo	50	53.14	Tinggi	Tercapai
9	BNN Kota Surabaya	53.76	52.40	Tinggi	Tercapai
10	BNN Kota Kediri	54.91	54.94	Sangat Tinggi	Tercapai
11	BNN Kabupaten Malang	56.47	57.00	Sangat Tinggi	Tercapai
12	BNN Kabupaten Gresik	49.74	49.15	Rendah	Tidak Tercapai
13	BNN Kabupaten Trenggalek	51.06	51.32	Tinggi	Tidak Tercapai
14	BNN Kabupaten Lumajang	55.13	52.42	Tinggi	Tercapai
15	BNN Kabupaten Blitar	50.38	54.34	Sangat Tinggi	Tercapai
16	BNN Kabupaten Kediri	54.46	53.01	Tinggi	Tercapai
17	BNN Kabupaten Pasuruan	45.57	48.57	Rendah	Tidak Tercapai
18	BNN Kabupaten Tuban	49.34	54.54	Sangat Tinggi	Tercapai

FAKTOR KEBERHASILAN

- Pemateri mampu membuat konten/materi sosialisasi yang kreatif sehingga memudahkan remaja menerima materi tentang *self regulation, assertiveness dan reachingout*.
- Peserta sudah ada yang mengerti materi yang diberikan sehingga dapat mengaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari.
- Pemahaman peserta dalam mengisi kuesioner aplikasi Dektari dengan benar

HAMBATAN DAN KENDALA

Hambatan yang ditemukan oleh BNNP Jatim dan jajaran tahun 2022 adalah:

- Masih ada peserta belum memahami materi ketahanan remaja dan materi ketahanan remaja belum dapat disampaikan secara komprehensif karena adanya pandemi covid 19
- Masih ada peserta tidak memahami pertanyaan yang ada dalam dektari
- Materi dektari seharusnya disampaikan secara berkesinambungan sehingga peserta dapat memahami tentang konsep ketahanan diri
- Untuk satker BNNK Gresik , BNNK Pasuruan, BNNK Mojokerto dan BNNK Trenggalek masih belum mencapai target indeks dikarenakan masih ada responden yang belum memahami pertanyaan dari survey dektari.

Alternatif Solusi:

- Dalam menyampaikan materi ketahanan diri pada remaja akan disampaikan contoh-contoh nyata tentang konsep *self regulation*, *assertiveness* dan *reachingout*
- Memberikan pemahaman kepada pihak sekolah (Kepala Sekolah, Guru BK maupun Guru Kelas) tentang materi ketahanan diri remaja sehingga konsep ketahanan diri remaja dapat disampaikan secara berkesinambungan oleh pihak sekolah

TINDAK LANJUT ATAS REKOMENDASI PERMASALAHAN SELANJUTNYA

Materi ketahanan diri remaja perlu disebarluaskan secara komprehensif dan kontinyu dengan pembuatan materi yang mudah diterima oleh remaja sehingga remaja memiliki softskill tentang *self regulation*, *assertiveness* dan *reachingout*.

2. Sasaran : Meningkatnya daya tangkal keluarga terhadap pengaruh buruk penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba

No.	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian Target (%)
1.	Jumlah Kabupaten/Kota dengan Indeks Ketahanan Keluarga Terhadap Penyalahgunaan Narkoba berkategori “Tinggi” di wilayah Provinsi dengan indeks minimal 78.68	17	16	94.11%

BNN sebagai institusi yang mengemban amanah dalam menanggulangi permasalahan narkoba di Indonesia mempunyai tugas dan fungsi dalam Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba dan Prekursor Narkoba. Deputy Bidang Pencegahan dalam tugasnya dibutuhkan penajaman program melalui kegiatan prioritas penanggulangan penyalahgunaan narkoba yakni melalui ketahanan keluarga. Ketahanan Keluarga Anti Narkoba yang menjadi fokus dari buku ini tidak terbatas pada satu lokus saja namun pada aspek yang lebih luas baik pada tingkat pusat hingga daerah.

METODE PENGUKURAN

Metode pengukuran menggunakan kuesioner Indeks Ketahanan Keluarga yang diisi oleh peserta Fasilitasi Program Ketahanan Keluarga yang diikuti oleh 20 (dua puluh) peserta yang terdiri dari 10 (sepuluh) orang tua (bapak/ibu/wali) dan 10 (sepuluh) anak. Hasil dari pengisian kuesioner diolah oleh Direktorat Advokasi melalui aplikasi statistik www.thestatistik.com dengan komponen sebagai berikut:

- 1) Kuesioner Demografi Keluarga
- 2) Kuesioner Indeks Ketahanan Keluarga
- 3) Survey Kepala Desa/Lurah
- 4) Survey Kepuasan Mengikuti Intervensi
- 5) Survey Resiliensi Anak dan Remaja (Pre test dan Post test)
- 6) Survey Kekuatan dan Kesulitan Anaka (Pretest dan Post test)
- 7) Survey Pola Pengasuhan Orang Tua (Pretest dan Post test)

PROGRAM KEGIATAN TERKAIT

Kegiatan ketahanan keluarga dilakukan dengan beberapa kegiatan seperti :

- Rapat Koordinasi Pelaksanaan Program Ketahanan Keluarga Anti Narkoba (1x pertemuan)
- Fasilitasi Pelaksanaan Program Ketahanan Keluarga Anti Narkoba (4x pertemuan)

Berikut ini merupakan Data Perhitungan Indeks Ketahanan Keluarga terhadap Penyalahgunaan Narkoba (DEKTARA) di wilayah BNNP Jatim dan Jajaran

NO	SATKER	NILAI DEKTARA	KATEGORI	KETERANGAN
1	BNNP JAWA TIMUR	78.929	TINGGI	tercapai
2	BNN KABUPATEN SUMENEP	83.214	TINGGI	tercapai
3	BNN KOTA MOJOKERTO	81.964	TINGGI	tercapai
4	BNN KOTA MALANG	90.536	SANGAT TINGGI	Tercapai
5	BNN KOTA BATU	82.232	TINGGI	Tercapai
6	BNN KABUPATEN TULUNGAGUNG	85.536	TINGGI	Tercapai
7	BNN KABUPATEN NGANJUK	77.589	TINGGI	Tidak Tercapai
8	BNN KABUPATEN SIDOARJO	81.607	TINGGI	Tercapai
9	BNN KOTA SURABAYA	87.143	TINGGI	Tercapai
10	BNN KOTA KEDIRI	89.554	SANGAT TINGGI	Tercapai
11	BNN KABUPATEN MALANG	85.446	TINGGI	Tercapai
12	BNN KABUPATEN GRESIK	96.339	SANGAT TINGGI	Tercapai
13	BNN KABUPATEN TRENGGALEK	87.946	TINGGI	Tercapai
14	BNN KABUPATEN LUMAJANG	91.071	SANGAT TINGGI	Tercapai
15	BNN KABUPATEN BLITAR	86.339	TINGGI	Tercapai
16	BNN KABUPATEN KEDIRI	88.393	SANGAT TINGGI	Tercapai
17	BNN KABUPATEN PASURUAN	78.929	TINGGI	Tercapai
18	BNN KABUPATEN TUBAN	87.143	TINGGI	tercapai

FAKTOR KEBERHASILAN

1. Penyampaian materi intervensi dari fasilitator sesuai dengan petunjuk pelaksanaan.

2. Antusiasme peserta dalam mengikuti intervensi sehingga mengerjakan tugas-tugas dalam setiap pertemuan kegiatan intervensi.
3. Pemahaman dalam pengisian kuesioner dengan benar.

HAMBATAN DAN KENDALA

Hambatan yang ditemukan oleh BNNP Jatim dan jajaran tahun 2022 adalah:

- Komunikasi yang terbatas karena perbedaan bahasa. Banyak dari peserta intervensi tidak begitu memahami Bahasa Indonesia sehingga fasilitator sedikit terkendala menyampaikan materi karena harus memilih penggunaan kata yang mudah dimengerti.
- Tingkat pemahaman kuesioner yang rendah oleh peserta dapat mempengaruhi hasil indeks ketahanan keluarga, sehingga petugas perlu menjelaskan lebih detail maksud dari kuesioner agar peserta dapat mengisi dengan benar.

Alternatif Solusi :

- Terkait permasalahan bahasa, BNNP Jatim akan berusaha menyampaikan dengan bahasa yang mudah dimengerti dan juga mengajak pendamping lokal yang untuk mempermudah proses komunikasi dan juga pemahaman dalam pengisian kuesioner.
- Fasilitator akan lebih membuat inovasi dalam pemberian materi ketahanan keluarga.
- Menjalin kerjasama dengan stakeholder yang lebih berpengalaman untuk menjadi fasilitator kegiatan intervensi ketahanan keluarga sehingga pemahaman peserta bisa lebih maksimal.

TINDAK LANJUT ATAS REKOMENDASI PERMASALAHAN SELANJUTNYA

Di Tahun 2023, BNNP Jatim dan jajaran akan melaksanakan koordinasi secara intensif dengan Pemerintah Kab/Kota serta Kepala Desa/Lurah dan menjalin kerjasama dengan stakeholder yang berpengalaman dalam bidang pembinaan keluarga agar pelaksanaan Ketahanan Keluarga di tahun 2023 bisa terlaksana dengan lebih baik serta pemilihan peserta yang efektif dengan timeline pelaksanaan yang sesuai dengan petunjuk teknis dengan harapan dapat memperoleh peningkatan dalam Indeks Ketahanan Keluarga

3. Sasaran : Terselenggaranya penguatan kapasitas pada instansi dan lingkungan masyarakat dalam upaya penanganan narkoba				
NO	INDIKATOR KERJA	TARGET	REALISASI	%

1	Jumlah Kabupaten/Kota dengan Indeks Kemandirian Partisipasi berkategori “Mandiri” di wilayah Provinsi	17 Kabupaten/ Kota	17 Kabupaten/ Kota	100%
---	---	--------------------------	-----------------------	------

Program pemberdayaan Peran Serta Masyarakat Anti narkoba di BNN Provinsi Jawa Timur dan Jajaran dilaksanakan dengan sasaran Instansi Pemerintah, Instansi Swasta, Lingkungan Pendidikan dan Lingkungan Masyarakat. Pada Tahun 2022 ini, Program Pemberdayaan Peran Serta Masyarakat diarahkan untuk mencapai Kabupaten/Kota Tanggap Ancaman Narkoba (KoTAN). dampak yang diharapkan dari pelaksanaan program kegiatan pemberdayaan masyarakat adalah peran serta dan kemandirian seluruh komponen masyarakat dan instansi pemerintah dalam upaya Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika (P4GN). Pemerintah daerah memiliki peran yang sangat besar dalam upaya menciptakan lingkungan yang bersih dari narkoba, khususnya pada tingkat Kabupaten/Kota karena berkaitan langsung dengan penyelenggaraan kehidupan masyarakat sehari-hari. Melalui kebijakan KOTAN ini, peran serta pemerintah daerah diharapkan dapat dimaksimalkan untuk mendukung upaya penanganan masalah narkoba di wilayah masing masing.

Adapun tahap kegiatan program ini adalah sebagai berikut :

1. **Pemetaan kelompok sasaran / Rapat Koordinasi Pengembangan dan Pembinaan Kota/Kabupaten Tanggap Ancaman Narkoba.** Dalam kegiatan ini para peserta kegiatan memetakan calon penggiat anti narkoba yang nantinya akan dilatih untuk menjadi penggiat anti narkoba di masing-masing lingkungan.
2. **Pengembangan Kapasitas dan Pembinaan Masyarakat melalui Kebijakan Kota Tanggap Ancaman Narkoba** di masing-masing lingkungan dalam bentuk kegiatan *Workshop* Penggiat P4GN (Instansi Pemerintah, Lingkungan Swasta, Lingkungan Masyarakat dan Lingkungan Pendidikan). *Workshop* Penggiat P4GN merupakan kegiatan pelatihan dan pengembangan pengetahuan serta kemampuan peserta dalam membuat rencana aksi P4GN yang akan diimplementasikan di lingkungan masing-masing. Seluruh peserta yang telah mengikuti kegiatan tersebut mendapatkan pin dan sertifikat penggiat anti narkoba.
3. **Pemberdayaan Masyarakat Anti Narkoba Melalui Tes Urine.** Kegiatan ini dilaksanakan untuk deteksi dini apakah ada/tidak ada penyalahgunaan narkoba di lingkungan sasaran masing-masing.

4. **Asistensi Kota/Kabupaten Tanggap Ancaman Narkoba (Lingkungan Pemerintah, Lingkungan Swasta).** Kegiatan ini bertujuan untuk memberikan pendampingan program untuk mendukung kebijakan KoTAN kepada lingkungan sasaran dalam upaya penyusunan Komponen Pendukung KoTan yaitu Perundang-Undangan, Anggaran, Implementasi hingga Evaluasi Kegiatan, Sumber Daya Manusia (Pegiat Anti Narkoba), Kemitraan Masyarakat dan Lembaga / Stakeholder terkait.
5. **Sinkronisasi Program dan Kerja / Konsolidasi Kebijakan Kabupaten/Kota Tanggap Ancaman Narkoba (Instansi Pemerintah, Lingkungan Swasta, Lingkungan Pendidikan).** Menyatukan visi misi masing-masing lingkungan sasaran agar mampu menggerakkan seluruh komponen masyarakat dalam kegiatan P4GN.
6. **Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Kota Tanggap Ancaman Narkoba.** Mengetahui tingkat keberhasilan dan kelemahan pelaksanaan program KoTAN, Mengukur keberhasilan, hambatan dan kendala yang dialami masing-masing lingkungan sasaran.

METODE PENGUKURAN

A. Untuk menghitung Indeks kemandirian Partisipasi (IKP) diperlukan 5 aspek yaitu:

1. **Aspek Manusia**, adalah Tokoh dan pegiat yang mendukung P4GN.
2. **Aspek Metode**, adalah Cara melakukan kegiatan/penyuluhan/sosialisasi dan pelatihan/tes urine).
3. **Aspek Anggaran**, adalah Dana swadaya atau *sponsorship* dan atau bantuan pemerintah untuk kegiatan P4GN.
4. **Aspek Sistem**, adalah Regulasi/aturan/norma/kebijakan yang dipergunakan dalam mendukung atau memperkuat pelaksanaan P4GN di lingkungan/ Instansi setempat.
5. **Aspek Sarana Prasarana, Alat Pendukung dan Media Promosi untuk Kegiatan P4GN**, adalah fasilitas pelatihan, sarana dan prasarana olahraga, liputan kegiatan, layanan pelatihan keterampilan dan fasilitas rehabilitasi yang dikelola oleh Pemerintah/Lingkungan Pendidikan/Dunia Usaha/Masyarakat dipergunakan dalam rangka mendukung pelaksanaan P4GN.

B. Untuk mengukur Indeks Kota Tanggap Ancaman Narkoba, terdapat beberapa variabel penting sebagai alat ukur yang tepat dalam usaha mencegah dan memberantas penyalahgunaan narkoba secara intensif. Variabel-variabel tersebut adalah sebagai berikut:

1. **Ketahanan Keluarga.** Keluarga merupakan lapis pertama yang merasakan akibat penyalahgunaan narkoba. Ketika ada seorang anggota keluarga yang terkena narkoba,

seluruh anggota keluarga akan merasakan akibatnya. Keluarga menjadi institusi penting sebagai tempat awal untuk mensosialisasikan bahaya narkoba kepada seluruh anggota keluarga. Keluarga yang tangguh tidak hanya membantu secara internal, tetapi juga meluas ke lingkungan sekitar, bahkan sampai tingkat negara. Sebaliknya, keluarga yang rapuh atau rentan tidak akan mampu membina anggotanya untuk tidak bersentuhan dengan narkoba.

- 2. Ketahanan Masyarakat.** Elemen-elemen dalam masyarakat, lembaga pendidikan, jurnalisme, dunia usaha, lembaga swadaya masyarakat, dan lembaga pemerintah saling menopang untuk menciptakan kehidupan masyarakat yang ideal. Idealisasi tersebut bersumber juga dari masyarakat yang berwujud norma adat, agama, dan aturan negara.
- 3. Kewilayahan.** Wilayah Kabupaten/Kota di Indonesia tidak hanya memiliki perbedaan secara geografis, tetapi juga perbedaan sosial, ekonomi, politik, dan pertahanan keamanan yang menciptakan kriteria perkotaan. Kabupaten/Kota yang memiliki pusat hiburan dengan jumlah anggota polisi yang tidak sebanding dengan luas wilayah dan absennya LSM yang bergerak di bidang narkoba harus lebih waspada terhadap ancaman narkoba dibandingkan dengan Kabupaten/Kota yang sedikit memiliki pusat hiburan, luas wilayah dan personel kepolisian sudah proporsional, dan ada LSM yang bergerak di bidang narkoba.
- 4. Lembaga dan Hukum.** Kabupaten/Kota yang tidak memiliki regulasi, anggaran, dan fasilitas rehabilitasi diprediksi akan kesulitan untuk melaksanakan program-program P4GN karena penyalahgunaan narkoba juga tidak hanya dilakukan oleh masyarakat umum, tetapi bisa juga aparat hukum.

FAKTOR KEBERHASILAN

1. Penyampaian materi dari narasumber yang sesuai dengan petunjuk pelaksanaan.
2. Terlaksananya Rencana Aksi jangka pendek yang disusun oleh Penggiat Anti Narkoba di Instansi Pemerintah, Lingkungan Pendidikan, dan Lingkungan Masyarakat.
3. Adanya monitoring dan asistensi yang diberikan oleh panitia untuk menindaklanjuti pelaksanaan rencana aksi P4GN.

Berikut adalah hasil perhitungan IKP di Provinsi Jawa Timur

NO	INSTANSI	LINGKUNGAN KERJA	NILAI IKP	TOTAL IKP	KATEGORI	KRITERIA
1	BNNP JATIM	1. Lingkungan Swasta	3.56	3.64	A	Sangat Mandiri
		2. Lingkungan Masyarakat	3.72			
2		1. Lingkungan Pemerintah	3.92	3.92	A	Sangat Mandiri

	BNNK TULUNGAGUNG	2. Lingkungan Pendidikan	3.92			
3	BNNK TUBAN	1. Lingkungan Swasta	4	3.86	A	Sangat Mandiri
		2. Lingkungan Pendidikan	3.72			
4	BNNK TRENGGALEK	1. Lingkungan Pemerintah	3.56	3.48	A	Sangat Mandiri
		2. Lingkungan Masyarakat	3.4			
5	BNNK SUMENEP	1. Lingkungan Pemerintah	3.32	3.28	A	Sangat Mandiri
		2. Lingkungan Pendidikan	3.24			
6	BNNK SIDOARJO	1. Lingkungan Pemerintah	3.36	3.68	A	Sangat Mandiri
		2. Lingkungan Swasta	4			
7	BNNK PASURUAN	1. Lingkungan Masyarakat	3.48	3.46	A	Sangat Mandiri
		2. Lingkungan Pendidikan	3.45			
8	BNNK MOJOKERTO	1. Lingkungan Pemerintah	3.8	3.76	A	Sangat Mandiri
		2. Lingkungan Masyarakat	3.72			
9	BNN KAB MALANG	1. Lingkungan Pemerintah	3.76	3.36	A	Sangat Mandiri
		2. Lingkungan Swasta	2.96			
10	BNNK LUMAJANG	1. Lingkungan Pemerintah	3.84	3.42	A	Sangat Mandiri
		2. Lingkungan Swasta	3			
11	BNN KAB KEDIRI	1. Lingkungan Masyarakat	3.84	3.5	A	Sangat Mandiri
		2. Lingkungan Pendidikan	3.16			
12	BNNK GRESIK	1. Lingkungan Pemerintah	3.3	3.3	A	Sangat Mandiri
		2. Lingkungan Pendidikan	3.3			
13	BNNK BLITAR	1. Lingkungan Pemerintah	3.3	3.31	A	Sangat Mandiri
		2. Lingkungan Pendidikan	3.32			
14	BNN KOTA SURABAYA	1. Lingkungan Pemerintah	3.28	3.34	A	Sangat Mandiri
		2. Lingkungan Pendidikan	3.4			
15	BNN KOTA MALANG	1. Lingkungan Pemerintah	3.76	3.38	A	Sangat Mandiri
		2. Lingkungan Masyarakat	3			
16	BNN KOTA KEDIRI	1. Lingkungan Pemerintah	3.44	3.5	A	Sangat Mandiri
		2. Lingkungan Masyarakat	3.56			
17	BNN KOTA BATU	1. Lingkungan Pemerintah	3.6	3.45	A	Sangat Mandiri
		2. Lingkungan Pendidikan	3.3			
18	BNNK NGANJUK	1. Lingkungan Pemerintah	3.23	3.23	B	Mandiri
		2. Lingkungan Pendidikan	3.23			

Berikut adalah hasil perhitungan Indeks Kota Tanggap Ancaman Narkoba (IKOTAN) Tahun 2022

NO	INSTANSI	SKOR VARIABEL					INDEKS 2022 (Skala 1-4)	KATEGORI
		Ketahanan Keluarga	Ketahanan Masyarakat	Kewila- yahan	Kelemba- gaan	Hukum		

1	BNNP JATIM	22.59	21.15	8.00	19.94	11.93	3.34	Tanggap
2	BNNK TULUNGAGUNG	22.26	20.16	7.57	19.37	11.84	3.25	Tanggap
3	BNNK TUBAN	22.87	20.95	7.86	20.10	11.65	3.34	Tanggap
4	BNNK TRENGGALEK	22.41	21.03	7.67	18.82	11.17	3.24	Tanggap
5	BNNK SUMENEP	22.86	21.12	8.15	19.98	11.79	3.36	Tanggap
6	BNNK SIDOARJO	23.12	21.08	8.17	20.59	12.01	3.40	Tanggap
7	BNNK PASURUAN	22.36	20.33	8.01	19.59	11.10	3.26	Tanggap
8	BNNK MOJOKERTO	22.81	20.45	7.62	18.47	11.35	3.23	Tanggap
9	BNN KAB MALANG	24.22	23.86	9.15	22.75	12.88	3.71	Sangat Tanggap
10	BNNK LUMAJANG	23.29	22.41	9.06	22.12	14.19	3.64	Sangat Tanggap
11	BNN KAB KEDIRI	22.78	20.35	7.39	18.63	11.53	3.23	Tanggap
12	BNNK GRESIK	20.53	20.46	7.55	19.28	11.44	3.17	Tanggap
13	BNNK BLITAR	22.49	20.98	8.16	18.87	11.24	3.27	Tanggap
14	BNN KOTA SURABAYA	22.87	21.13	7.70	21.07	11.49	3.37	Tanggap
15	BNN KOTA MALANG	21.57	21.44	8.50	21.02	13.06	3.42	Tanggap
16	BNN KOTA KEDIRI	23.15	22.97	8.44	21.60	13.41	3.58	Sangat Tanggap
17	BNN KOTA BATU	22.63	20.89	7.66	18.82	11.17	3.24	Tanggap
18	BNNK NGANJUK	22.23	20.90	7.81	19.05	11.81	3.27	Tanggap

HAMBATAN DAN KENDALA

1. Masih belum semua stakeholder dan OPD yang responsif untuk menjalankan P4GN untuk mendukung KOTAN.
2. Perencanaan KoTAN pada akhir tahun mempengaruhi Penganggaran kegiatan di masing-masing lingkungan sasaran belum dapat maksimal.
3. Program KoTAN masih belum sepenuhnya tersosialisasi di masing-masing lingkungan sasaran khususnya Instansi Pemerintah.

Alternatif Solusi:

1. Setelah menerima arahan dari Pembina Fungsi maka BNNP Jatim segera melaksanakan Asistensi dan Sinkronisasi/Konsolidasi Kota Tanggap Ancaman Narkoba kepada lingkungan sasaran (Pemerintah, Pendidikan, Swasta dan Masyarakat).
2. Berkoordinasi dengan BNN Kab/Kota terkait dalam hal pemilihan peserta kegiatan agar kegiatan KoTAN dapat berjalan maksimal.
3. Bidang Pencegahan dan Pemberdayaan Masyarakat BNNP Jawa Timur memberikan pendampingan kepada stakeholder terkait untuk pengisian Kuesioner KoTAN

TINDAK LANJUT ATAS REKOMENDASI PERMASALAHAN SELANJUTNYA

1. Mendorong setiap lingkungan sasaran khususnya lingkungan swasta untuk membuat kebijakan dan Program-Program P4GN.
2. Memberikan pandangan kepada masing-masing lingkungan bahwa permasalahan narkoba bukan hanya tugas Badan Narkotika Nasional namun dibutuhkan sinergi seluruh stakeholder melaksanakan kegiatan P4GN dalam perang melawan narkoba (*War on Drugs*) agar masyarakat mempunyai daya tangkal dan menerapkan pola hidup sehat tanpa narkoba demi terwujudnya Indonesia Bersih Narkoba (BERSINAR).
3. Memotivasi setiap lingkungan sasaran bahwa Indeks Kota Tanggap Ancaman Narkoba (IKoTAN) ini akan berpengaruh terhadap penilaian Kabupaten/Kota di tingkat Nasional dalam mengantisipasi dan memitigasi potensi ancaman kejahatan Narkoba, maka diharapkan program ini dapat berjalan optimal untuk mewujudkan KOTAN dengan kategori sangat tanggap di tahun berikutnya.

4. Sasaran : Meningkatnya upaya pemulihan kawasan atau wilayah rawan narkoba secara berkelanjutan				
N O	INDIKATOR KERJA	TARGET	REALISASI	%
1	Jumlah kawasan rawan di wilayah provinsi yang beralih status dari “Bahaya” menjadi “Waspada”	2	2	100%
2	Nilai Keterpulihan Kawasan Rawan yang di intervensi	2.75	BNNP Jatim : 2.45	50%
			BNNK Malang : 3.05	

1. Program pemberdayaan alternatif BNNP Jawa Timur

- Program pemberdayaan alternatif Tahun Anggaran 2022 diselenggarakan di Kelurahan Sukun, Kecamatan Sukun, Kota Malang. Sebanyak 15 orang peserta yang terdiri dari

karang taruna, mantan pecandu narkoba, dan PKK mengikuti pelatihan selama 3 hari. Para peserta dilatih untuk kerajinan sablon baik manual maupun digital serta pemasaran melalui sosial media.

- Hasil yang dicapai dari kegiatan ini adalah para peserta memiliki keahlian untuk memproduksi produk sablon dalam bentuk kaos, gantungan kunci, tumbler mug dengan memanfaatkan modal bahan sablon yang diberikan oleh BNNP Jatim serta mampu untuk memasarkannya di sosial media.

2. Program pemberdayaan alternatif BNNK Malang

Program pemberdayaan alternatif di BNN Kab Malang diselenggarakan di Desa Ngadilangkung, Kecamatan Kepanjen Kabupaten Malang. Sebanyak 15 peserta yang merupakan anggota karang taruna dan mantan pecandu narkoba dipilih oleh kepala desa untuk mengikuti kegiatan dimaksud. Jenis pelatihan yang diberikan adalah pelatihan kreasi hantaran dan tas souvenir. Hasil yang dicapai dari kegiatan ini adalah peserta mendapatkan ketrampilan membuat souvenir untuk pesta hantaran atau sesuai permintaan dan bahan-bahan bisa di dapatkan dengan memanfaatkan potensi alam sekitar.

METODE PENGUKURAN

Pengukuran tingkat keberhasilan pelaksanaan program pemberdayaan alternatif adalah dengan menghitung nilai Indeks Keterpulihan Kawasan Rawan Narkoba (IKKR) yang terdiri dari 3 aspek yaitu

1. Indikator Pokok Kerawanan Narkoba, yaitu dengan menurunnya jumlah bandar narkoba, produksi narkoba, *entry point* narkoba, kurir narkoba, pecandu narkoba, kasus narkoba, barang bukti narkoba dan kejahatan umum di lingkungannya.
2. Indikator pendukung, yaitu dengan menurunnya/berkurangnya tempat hiburan, angka kemiskinan, kos-kosan, sarana publik, dan bertambahnya interaksi sosial masyarakat.
3. Tingkat Keberhasilan Program, terdiri dari hasil yang dirasakan masyarakat, keberlanjutan program, pelaksana program, pelaksanaan program, sinergi instansi pemerintah, kemitraan dunia usaha dan dampak keberdayaan masyarakat.

REKAPITULASI PERHITUNGAN INDEKS KETERPULIHAN KAWASAN RAWAN BNNP JAWA TIMUR DAN JAJARAN T.A. 2022

NO	NAMA SATKER	STATUS KERAWANAN	IKKR AWAL	IKKR AKHIR	KATEGORI KETERPULIHAN
1	BNNP Jawa Timur	Bahaya	1.68	2.45	WASPADA
2	BNNK Malang	Bahaya	1.73	3.05	WASPADA

PERBANDINGAN CAPAIAN DENGAN KINERJA TAHUN SEBELUMNYA

Alokasi anggaran program pemberdayaan alternative pada Tahun Anggaran 2020 adalah BNNP Jawa Timur, BNNK Tulungagung, BNNK Malang, dan BNNK Sumenep dengan capaian kinerja 100%. Sedangkan Tahun Anggaran 2021 satker yang mendapatkan alokasi anggaran untuk program pemberdayaan alternatif adalah BNNP Jawa Timur, BNNK Batu, dan BNNK Gresik dengan capaian kinerja sebesar 100%.

FAKTOR KEBERHASILAN

1. Sinergitas BNNP Jawa Timur dan jajaran dengan stakeholder untuk mendukung wilayah kawasan rawan binaan pemberdayaan alternatif.
2. Antusiasme peserta kegiatan dalam mengaplikasikan materi pelatihan dan memulai kewirausahaan.

Alternatif Solusi:

1. Melakukan koordinasi dengan Pemerintah Daerah dan stakeholder untuk dapat mendukung program pemberdayaan alternatif serta dapat membantu proses pemasaran produk.
2. BNNP Jatim akan berusaha untuk memantau dan melakukan asistensi pada peserta kegiatan agar bisa kembali produktif dalam mengaplikasikan hasil pelatihan.

HAMBATAN DAN KENDALA

1. Dukungan Pemerintah Daerah masih kurang maksimal terkait keberlangsungan program pemberdayaan alternatif di kawasan rawan narkoba.
2. Pelaksanaan kegiatan Pemberdayaan Alternatif oleh satker BNNP Jatim di Kelurahan Sukun Kota Malang sudah mencapai target kategori dari Bahaya ke Waspada namun belum mencapai target indeks yaitu 2.75 dikarenakan saat penghitungan IKKR akhir ternyata angka kemiskinan masih cukup tinggi dan masih banyak kos-kosan dengan privasi tinggi di Kelurahan Sukun sehingga masih berpotensi adanya peredaran narkoba.

TINDAK LANJUT ATAS REKOMENDASI PERMASALAHAN SELANJUTNYA

1. Mendorong Pemerintah Daerah untuk membuat Peraturan Daerah tentang P4GN sehingga OPD yang terlibat dapat mendukung secara maksimal pelaksanaan program pemberdayaan alternatif yang ada di wilayahnya.
2. Melakukan monitoring secara periodik terhadap peserta pelatihan.

5. Sasaran : Meningkatnya Kapasitas Tenaga Teknis Rehabilitasi

No	Indikator Kinerja (003.002.006)	Target	Realisasi	Capaian Target (%)
6	Jumlah petugas penyelenggara layanan IBM yang terlatih	94	115	122,34 %

Kondisi umum kejahatan narkoba dalam hal *demand side* salah satunya adalah rehabilitasi. Dalam hal ini BNN mendapatkan mandat dari undang-undang untuk melaksanakan penguatan lembaga rehabilitasi dan melakukan rehabilitasi itu sendiri. Penguatan lembaga rehabilitasi meliputi penguatan fasilitas rehabilitasi, tenaga rehabilitasi dan akhirnya melakukan standarisasi terhadap lembaga rehabilitasi yang ada. BNN telah melakukan rehabilitasi secara komprehensif dan berkelanjutan mulai dari rehabilitasi medis dan/atau sosial hingga layanan pascarehabilitasi.

Program rehabilitasi terus dilakukan sebagai upaya agar para pencandu dan korban penyalahgunaan dapat pulih dan mempertahankan pemulihannya serta meningkatkan fungsi sosialnya di masyarakat. Terbatasnya jumlah lembaga rehabilitasi yang ada mengakibatkan aksesibilitas layanan rehabilitasi yang masih minim. Oleh karenanya diperlukan penambahan aksesibilitas fasilitas rehabilitasi untuk menjangkau kebutuhan layanan rehabilitasi di masyarakat melalui peningkatan layanan rehabilitasi berbasis masyarakat yang nantinya dikembangkan sendiri oleh masyarakat dan untuk masyarakat guna meningkatkan aksesibilitas dan jangkauan rehabilitasi di masyarakat.

IBM (Intervensi Berbasis Masyarakat) merupakan bentuk kepedulian pemerintah dalam penanganan penyalahgunaan narkoba di masyarakat, dengan cara menghadirkan layanan rehabilitasi di masyarakat, mengingat ketersediaan dan aksesibilitas layanan yang masih terbatas jumlahnya. Program ini dilakukan dengan pendekatan dalam bentuk sederhana, yang berarti layanan tersebut mudah diakses dan tidak membutuhkan persyaratan yang sulit untuk terlibat di dalamnya. Program IBM dilakukan dengan memberdayakan agen pemulihan (AP) yang

merupakan kader IBM di desa/kelurahan. BNNP Jatim telah memberikan pelatihan bagi masyarakat yang menjadi petugas AP.

Secara rinci target dan capaian petugas penyelenggara layanan IBM yang terlatih BNNP dan BNNKab/Kota se-Jawa Timur tahun anggaran 2022 sebagai berikut:

NO	SATKER	TARGET		CAPAIAN	
	Provinsi Jawa Timur	94	Orang	115	Orang
1	BNN PROVINSI JAWA TIMUR	5	Orang	10	Orang
2	BNN KOTA SURABAYA	5	Orang	5	Orang
3	BNN KOTA MALANG	5	Orang	5	Orang
4	BNN KOTA BATU	5	Orang	10	Orang
5	BNN KOTA MOJOKERTO	5	Orang	10	Orang
6	BNN KOTA KEDIRI	5	Orang	5	Orang
7	BNN KAB. SIDOARJO	10	Orang	10	Orang
8	BNN KAB. GRESIK	5	Orang	6	Orang
9	BNN KAB. TUBAN	5	Orang	5	Orang
10	BNN KAB. LUMAJANG	5	Orang	5	Orang
11	BNN KAB. MALANG	5	Orang	5	Orang
12	BNN KAB. BLITAR	5	Orang	8	Orang
13	BNN KAB. TULUNGAGUNG	5	Orang	5	Orang
14	BNN KAB. TRENGGALEK	5	Orang	5	Orang
15	BNN KAB. KEDIRI	5	Orang	6	Orang
16	BNN KAB. SUMENEP	5	Orang	5	Orang
17	BNN KAB. PASURUAN	4	Orang	5	Orang
18	BNN KAB. NGANJUK	5	Orang	5	Orang

FAKTOR KEBERHASILAN

1. Antusias warga masyarakat untuk menjadi petugas Agen Pemulihan di kelurahan masing-masing.
2. Adanya dukungan dari Kepala Desa setempat untuk membentuk Agen Pemulihan di wilayahnya.

HAMBATAN DAN KENDALA DISERTAI ALTERNATIF SOLUSI

1. Petugas Agen Pemulihan yang telah terlatih dan telah diSKepkan oleh BNN mengundurkan diri, sehingga perlu adanya pergantian petugas AP.
2. Adanya kesulitan mencocokkan waktu antara AP dan klien.
3. Agen Pemulihan memiliki kesibukan lain sehingga kurang focus dalam kegiatan IBM

Alternatif solusi:

1. BNNP Jawa Timur memberikan bimbingan teknis secara mandiri kepada petugas AP yang baru.
2. Menyusun jadwal Bersama antara AP dan klien
3. Meminta komitmen AP agar dapat fokus dalam melakukan kegiatan IBM meskipun ada kesibukan lain

TINDAK LANJUT UNTUK TAHUN BERIKUTNYA

1. Memberikan saran kepada Kepala desa/ Lurah untuk memilih AP (Agen pemulihan) sesuai dengan kriteria salah satunya yang memiliki komitmen

Dalam rangka meningkatkan kualitas layanan rehabilitasi pada lembaga rehabilitasi di Klinik BNNP/BNNK, LRIP dan LRKM, BNNP Jawa Timur melakukan peningkatan kemampuan tenaga rehabilitasi melalui sertifikasi konselor adiksi. Penyelenggaraan sertifikasi ini bekerjasama dengan Tim Asesor sertifikasi konselor adiksi dari LSP BNN (Pusat).

Ada beberapa kriteria/standar yang diujikan dalam sertifikasi konselor adiksi atau yang biasa disebut dengan Standar Kompetensi Kerja (SKK), antara lain:

1. Melakukan skrining gangguan penggunaan zat pada klien
2. Melakukan penerimaan awal klien dengan gangguan penggunaan zat.
3. Melakukan asesmen klien dengan gangguan penggunaan zat.
4. Melakukan perencanaan rawatan klien dengan gangguan penggunaan zat.
5. Menyusun rancangan edukasi pada klien dengan gangguan penggunaan zat.
6. Melakukan edukasi pada klien dengan gangguan zat.
7. Melakukan konseling individu pada klien dengan gangguan penggunaan zat.
8. Melakukan konseling kelompok pada klien dengan gangguan penggunaan zat.
9. Melakukan penanganan dini saat krisis pada klien dengan gangguan penggunaan zat.
10. Melakukan konferensi kasus pada klien dengan gangguan penggunaan zat.
11. Melakukan konsultasi dan koordinasi dengan profesi dan lembaga lain.

No	Indikator Kinerja (003.002.007)	Target	Realisasi	Capaian Target (%)
7	Jumlah petugas Rehabilitasi yang tersertifikasi kompetensi teknis	5	10	200

Berikut adalah daftar nama peserta sertifikasi konselor adiksi yang dilaksanakan oleh BNNP Jawa Timur :

NO	NAMA PESERTA	ASAL INSTANSI	HASIL UJI KOMPETENSI
1	Joko Triono	Yayasan Bambu Nusantara	Kompeten
2	Ika Nur Widayati, S.ST	BNN Kota Surabaya	Kompeten
3	Ichsanul Amal Shohib, S.Kep	BNN Kab. Blitar	Kompeten
4	Ighnahsisus Jonny Budiman	RSJ Menur	Belum Kompeten
5	Doni Arisetiawan	RSJ Menur	Belum Kompeten
6	Vivin Elvionita, AMKL	BNN Kab. Sidoarjo	Kompeten
7	Laksono Bawono Febriarto	RSJ Dr. Radjiman Wediodiningrat Lawang	Belum Kompeten
8	Retno Pratiwi, S.Psi., M.M	BNN Kab. Malang	Kompeten
9	Safitri Agustiana, S.E	BNN Kota Mojokerto	Kompeten
10	Hafis Baraas	IPWL KP2M Banyuwangi	Kompeten
11	Tika Meliyati Putri, S.Si	Yayasan Gendhog Nemu Sariro (Gennesa) Banyuwangi	Belum Kompeten
12	Andri Arisandi, AMK	BNN Kab. Sumenep	Kompeten
13	Mochammad Shodiqin	Yayasan Orbit	Kompeten
14	Hermansyah	BNN Kab. Sidoarjo	Kompeten

Dari 14 peserta yang mengikuti Uji Kompetensi Konselor adiksi diperoleh hasil 10 peserta kompeten dan 4 peserta belum kompeten.

FAKTOR KEBERHASILAN

1. Beberapa peserta uji kompetensi telah mengikuti pelatihan UTC-5, dimana uji kompetensi ini banyak mengujikan terkait layanan yang diajarkan di UTC-5.

HAMBATAN DAN KENDALA DISERTAI ALTERNATIF SOLUSI

1. Calon peserta uji kompetensi belum memahami Standar Kompetensi Kerja (SKK) konselor adiksi, dimana SKK adalah bahan uji kompetensi.

Alternatif solusi:

BNNP Jatim mengadakan virtual meeting kepada calon peserta ukom untuk menjelaskan SKK konselor adiksi dan memberikan motivasi kepada peserta uji kompetensi agar dapat lulus uji kompetensi.

TINDAK LANJUT UNTUK TAHUN BERIKUTNYA

1. Calon peserta uji kompetensi konselor adiksi sudah mendapatkan pelatihan UTC-5 sehingga peserta paham tentang SKK yang dinilai dalam uji kompetensi tersebut.

6. Sasaran : Meningkatnya aksesibilitas dan kemampuan fasilitas layanan

No	Indikator Kinerja (003.002.008)	Target	Realisasi	Capaian Target (%)
8	Jumlah lembaga rehabilitasi yang memenuhi Standar Pelayanan Minimal (SPM) di wilayah provinsi	10	12	120

Peningkatan aksesibilitas fasilitas rehabilitasi dalam menjangkau kebutuhan layanan rehabilitasi di masyarakat selain dari peningkatan layanan rehabilitasi berbasis masyarakat juga dari penyelenggara layanan rehabilitasi dari Klinik BNNP/BNNK, LRIP dan LRKM.

Dalam rangka meningkatkan kemampuan fasilitas layanan, BNNP Jawa Timur melakukan peningkatan kinerja lembaga melalui pelaksanaan standardisasi lembaga rehabilitasi sesuai dengan Standar Pelayanan Minimal (SPM).

SPM adalah acuan persyaratan minimal yang harus dipenuhi dalam penyelenggaraan layanan rehabilitasi bagi pecandu narkoba, penyalahguna narkoba dan korban penyalahgunaan narkoba, agar layanan rehabilitasi yang diselenggarakan berkualitas. Tujuan SPM salah satunya untuk mempersiapkan penyelenggara layanan rehabilitasi baik BNN maupun mitra BNN menuju Standar Nasional Indonesia (SNI).

Target lembaga rehabilitasi yang memenuhi Standar Pelayanan Minimal (SPM) tahun anggaran 2022 sebanyak 10 (sepuluh) Lembaga, dengan capaian sebanyak 12 (dua belas) Lembaga. Berikut Lembaga rehabilitasi yang memenuhi SPM.

NO	LEMBAGA REHABILITASI	KATEGORI NILAI
1	Klinik Pratama BNN Kota Surabaya	A
2	Klinik Pratama BNN Kota Mojokerto	A
3	Klinik Pratama BNN Kota Kediri	A
4	Klinik Pratama BNN Kota Batu	A
5	Klinik Pratama BNN Kota Malang	A
6	Klinik Pratama BNN Kab. Tuban	A
7	Klinik Pratama BNN Kab. Malang	A
8	Klinik Pratama BNN Kab. Sidoarjo	A
9	Klinik Pratama BNN Kab. Blitar	A
10	Klinik Pratama BNN Kab. Trenggalek	A
11	RSU Annisa Kab. Blitar (Tipe D)	A
12	RSJ. Dr. Radjiman Wediodiningrat Lawang	A

FAKTOR KEBERHASILAN

1. Adanya kemauan dan kemampuan dari SDM untuk melengkapi persyaratan yang kurang dalam bimtek pertama.

2. Adanya kerjasama antar tim yang solid.
3. Adanya sarana prasarana yang mendukung.

HAMBATAN DAN KENDALA DISERTAI ALTERNATIF SOLUSI

1. Beberapa Lembaga rehabilitasi belum memenuhi persyaratan SDM. Belum memiliki perawat/ pekerja sosial
2. Beberapa Lembaga rehabilitasi belum memenuhi persyaratan sarana prasarana
3. Beberapa Lembaga rehabilitasi belum tertib administrasi

Alternatif solusi:

- a. Memberikan bimtek dan arahan kepada petugas rehabilitasi agar dapat memenuhi persyaratan SDM dan sarana prasarana
- b. Memberikan bimtek terkait administrasi dalam layanan rehabilitasi

TINDAK LANJUT UNTUK TAHUN BERIKUTNYA

1. Memberikan bimtek SPM kepada BNNK untuk mempersiapkan target tahun berikutnya.

No	Indikator Kinerja (003.002.009)	Target	Realisasi	Capaian Target (%)
9	Jumlah unit penyelenggara layanan rehabilitasi Intervensi Berbasis Masyarakat (IBM) di wilayah provinsi	19	22	115,79

Salah satu respon BNN dalam menanggulangi masalah penyalahgunaan Narkoba adalah dengan membentuk program Desa Bersinar, yaitu desa yang diupayakan memiliki kemampuan untuk mengatasi peredaran gelap dan penyalahgunaan Narkoba di wilayahnya secara mandiri.

Program IBM merupakan salah satu bentuk respon masyarakat terhadap layanan rehabilitasi minimal dalam kaitan dengan program P4GN terkait Desa Bersinar. Partisipasi masyarakat dibutuhkan dalam mengentaskan masalah penyalahgunaan narkoba, karena masalahnya ada di masyarakat dan potensi sumber untuk menanganinya pun ada di masyarakat.

Secara rinci target dan capaian unit penyelenggara layanan rehabilitasi Intervensi Berbasis Masyarakat (IBM) di wilayah Provinsi Jawa Timur pada tahun anggaran 2021 sebagai berikut:

NO	SATKER	TARGET		CAPAIAN	
	Provinsi Jawa Timur	19	Unit	22	Unit
1	BNN PROVINSI JAWA TIMUR	1	Unit	2	Unit
2	BNN KOTA SURABAYA	1	Unit	1	Unit
3	BNN KOTA MALANG	1	Unit	1	Unit
4	BNN KOTA BATU	2	Unit	3	Unit
5	BNN KOTA MOJOKERTO	1	Unit	2	Unit
6	BNN KOTA KEDIRI	1	Unit	1	Unit
7	BNN KAB. SIDOARJO	1	Unit	1	Unit
8	BNN KAB. GRESIK	1	Unit	1	Unit
9	BNN KAB. TUBAN	1	Unit	1	Unit
10	BNN KAB. LUMAJANG	1	Unit	1	Unit
11	BNN KAB. MALANG	1	Unit	1	Unit
12	BNN KAB. BLITAR	1	Unit	1	Unit
13	BNN KAB. TULUNGAGUNG	1	Unit	1	Unit
14	BNN KAB. TRENGGALEK	1	Unit	1	Unit
15	BNN KAB. KEDIRI	1	Unit	1	Unit
16	BNN KAB. SUMENEP	1	Unit	1	Unit
17	BNN KAB. PASURUAN	1	Unit	1	Unit
18	BNN KAB. NGANJUK	1	Unit	1	Unit

FAKTOR KEBERHASILAN

1. Dari 22 (dua puluh dua) unit penyelenggara IBM terdapat 7 (tujuh) unit IBM dengan fase Prima, dimana unit IBM tersebut didukung oleh dana desa.
2. Adanya komitmen perangkat desa dan Agen Pemulihan (AP) untuk menyelenggarakan layanan IBM.

HAMBATAN DAN KENDALA SERTA ALTERNATIF SOLUSI

1. Tidak semua IBM didukung oleh dana desa
2. Beberapa unit IBM kesulitan mendapatkan klien

Alternatif solusi:

- a. Melakukan pendekatan kepada desa/ kelurahan penyelenggara IBM, agar dapat menggarkan dana desa untuk kegiatan IBM
- b. BNNP/BNNK melakukan pendekatan lebih intens dengan pihak perangkat desa dalam rangka pencapaian target klien.

TINDAK LANJUT UNTUK TAHUN BERIKUTNYA

1. Diperlukan komitmen desa atau kelurahan agar dapat mendukung kegiatan IBM, dengan mengalokasikan dana desa dan memfasilitasi AP dalam menjangkau klien

7.	Sasaran : Meningkatnya Kualitas Layanan Rehabilitasi Narkotika di Klinik Pratama BNNP Jawa Timur			
No	Indikator Kinerja (003.002.010)	Target	Realisasi	Capaian Target (%)
10	Indeks kepuasan layanan klinik rehabilitasi BNN Provinsi	3.4	3.707	109,03

Berikut target dan capaian indeks kepuasan layanan di BNNP dan BNN Kab/Kota se-Jawa Timur:

NO	SATKER	Target	Capaian
1	BNN KOTA SURABAYA		3,322
2	BNN KOTA MALANG		3,328
3	BNN KOTA BATU		3,764
4	BNN KOTA MOJOKERTO	3,25	3,991
5	BNN KOTA KEDIRI	3,2	3,168
6	BNN KAB. SIDOARJO	3,2	3,597
7	BNN KAB. GRESIK	3,2	3,115
8	BNN KAB. TUBAN	3,2	3,403
9	BNN KAB. LUMAJANG	3,1	3,275
10	BNN KAB. MALANG	3,2	3,425
11	BNN KAB. BLITAR	3,2	3,472
12	BNN KAB. TULUNGAGUNG	3,3	3,561
13	BNN KAB. TRENGGALEK	3,2	3,500
14	BNN KAB. KEDIRI	3,2	3,687
15	BNN KAB. SUMENEP	3,2	3,098
16	BNN KAB. PASURUAN	-	-
17	BNN KAB. NGANJUK	3,1	3,409

Beberapa poin yang ditanyakan dalam kuesioner IKM, antara lain:

1. Persyaratan layanan
2. Sistem, mekanisme dan prosedur layanan
3. Waktu pelayanan

4. Biaya/tarif
5. Produk dan spesifikasi jenis layanan
6. Kompetensi pelaksana
7. Perilaku pelaksana
8. Penanganan pengaduan, saran dan masukan
9. Sarana dan prasarana

FAKTOR KEBERHASILAN

1. Memberikan pelayanan sesuai dengan prosedur dan berpedoman pada kepuasan klien.

HAMBATAN DAN KENDALA DISERTAI ALTERNATIF SOLUSI

1. Terdapat BNNK yang tidak dapat mengisi survey dikarenakan klien tidak memenuhi kriteria inklusi
2. Terdapat BNNK yang tidak memenuhi target indeks kepuasan masyarakat

Alternatif solusi:

Agar BNNK lebih meningkatkan kualitas layanan rehabilitasinya.

TINDAK LANJUT UNTUK TAHUN BERIKUTNYA

1. Agar semua Lembaga rehabilitasi dapat melakukan layanan rehabilitasi yang berkualitas.

Selain penyelenggaraan rehabilitasi di lembaga rehabilitasi milik BNN, BNN juga mendukung lembaga rehabilitasi instansi pemerintah dan komponen masyarakat dalam upaya optimalisasi layanan rehabilitasi, berupa peningkatan kemampuan petugas rehabilitasi dan fasilitasi layanan rehabilitasi. Berdasarkan data LKIP Deputi Bidang Rehabilitasi tahun 2020 (akhir periode Renstra 2015-2019) BNN terdapat 497 lembaga rehabilitasi yang telah beroperasi dengan kapasitas sekitar 52.000 orang atau sekitar 10,5% dari jumlah pecandu dan korban penyalahgunaan narkoba dengan kategori teratur pakai. Data tersebut menunjukkan bahwa lembaga rehabilitasi yang ada jumlahnya masih sangat terbatas sehingga mengakibatkan aksesibilitas layanan rehabilitasi yang masih minim.

Tantangan aksesibilitas layanan rehabilitasi menjadi hal pokok yang harus segera ditangani. Hal ini dikarenakan kapasitas tersebut masih sangat jauh apabila dibandingkan kebutuhan jangkauan dari mereka yang seharusnya menjadi prioritas rehabilitasi.

Berikut adalah target dan capaian lembaga rehabilitasi yang operasional yang bekerjasama dengan BNNP/BNNK yang berasal dari LRIP dan LRKM di wilayah Provinsi Jawa Timur:

NO	SATKER	Ter-Skep BNN		Operasional	
	Provinsi Jawa Timur	60	Lembaga	56	Lembaga
1	BNN PROVINSI JAWA TIMUR	5	Lembaga	6	Lembaga
2	BNN KOTA SURABAYA	7	Lembaga	6	Lembaga
3	BNN KOTA MALANG	4	Lembaga	4	Lembaga
4	BNN KOTA BATU	3	Lembaga	3	Lembaga
5	BNN KOTA MOJOKERTO	3	Lembaga	3	Lembaga
6	BNN KOTA KEDIRI	2	Lembaga	2	Lembaga
7	BNN KAB. SIDOARJO	6	Lembaga	5	Lembaga
8	BNN KAB. GRESIK	4	Lembaga	3	Lembaga
9	BNN KAB. TUBAN	4	Lembaga	4	Lembaga
10	BNN KAB. LUMAJANG	3	Lembaga	3	Lembaga
11	BNN KAB. MALANG	3	Lembaga	3	Lembaga
12	BNN KAB. BLITAR	3	Lembaga	3	Lembaga
13	BNN KAB. TULUNGAGUNG	3	Lembaga	3	Lembaga
14	BNN KAB. TRENGGALEK	1	Lembaga	1	Lembaga
15	BNN KAB. KEDIRI	1	Lembaga	1	Lembaga
16	BNN KAB. SUMENEP	5	Lembaga	4	Lembaga
17	BNN KAB. PASURUAN	1	Lembaga	1	Lembaga
18	BNN KAB. NGANJUK	1	Lembaga	1	Lembaga

Dari jumlah data diatas, berikut daftar Lembaga Rehabilitasi Instansi Pemerintah (LRIP) yang operasional maupun yang belum operasional pada tahun anggaran 2022:

NO	SATUAN KERJA	LRIP YANG TER-SKEP BNN		OPERASIONAL/ BELUM OPERASIONAL
1	BNNP JAWA TIMUR	1	Klinik BNNP Jawa Timur	OPERASIONAL
2	BNN KABUPATEN MALANG	2	Klinik Pratama BNN Kabupaten Malang	OPERASIONAL
		3	RSJ Wedyodiningrat Lawang	OPERASIONAL
3	BNN KABUPATEN SUMENEP	4	Klinik Pratama Bnnk Sumenep	OPERASIONAL
		5	Puskesmas Dasuk	OPERASIONAL
		6	Puskesmas Batang-Batang	OPERASIONAL
		7	Puskesmas Guluk-Guluk	OPERASIONAL
4	BNN KOTA MOJOKERTO	8	Klinik Pratama BNN Kota Mojokerto	OPERASIONAL
		9	Puskesmas Gedongan Kota Mojokerto	OPERASIONAL

5	BNN KOTA SURABAYA	10	Klinik Pratama BNN Kota Surabaya	OPERASIONAL
		11	RSJ Menur	OPERASIONAL
6	BNNK TULUNGAGUNG	12	Klinik Pratama IPWL Tunas Asih BNNK Tulungagung	OPERASIONAL
		13	Puskesmas Bangunjaya Tulungagung	OPERASIONAL
7	BNNK LUMAJANG	14	Rehsos BNNK Lumajang	OPERASIONAL
		15	Puskesmas Klakah	OPERASIONAL
		16	Puskesmas Djatiroto	OPERASIONAL
8	BNN KAB. PASURUAN	17	RSUD. Bangil	OPERASIONAL
9	BNNK GRESIK	18	Klinik Pratama Bnnk Gresik	OPERASIONAL
		19	RSUD Ibnu Sina Gresik	OPERASIONAL
10	BNN KABUPATEN TRENGGALEK	20	Klinik Pratama Harapan Sehat Rawat Jalan BNN Kabupaten Trenggalek	OPERASIONAL
11	BNNK SIDOARJO	21	Klinik Pratama BNNK Sidoarjo	OPERASIONAL
12	BNNK NGANJUK	22	Klinik Pratama BNNK Nganjuk	OPERASIONAL
13	BNN KABUPATEN KEDIRI	23	Klinik Pratama BNN Kab. Kediri	OPERASIONAL
14	BNNK BLITAR	24	Klinik Pratama BNNK Blitar	OPERASIONAL
15	BNN KOTA BATU	25	Klinik Pratama BNN Kota Batu	OPERASIONAL
		26	Puskesmas Batu	OPERASIONAL
16	BNNK TUBAN	27	Klinik BNNK Tuban	OPERASIONAL
		28	Puskesmas Tuban	OPERASIONAL
		29	RSUD dr.R.Koesma Tuban	OPERASIONAL
17	BNN KOTA MALANG	30	Klinik Pratama BNN Kota Malang	OPERASIONAL
		31	Pusat Rehabilitasi Napza RSSA	OPERASIONAL
		32	Puskesmas Kendalsari	OPERASIONAL
18	BNN KOTA KEDIRI	33	Klinik Pratama Rawat Jalan BNN Kota Kediri	OPERASIONAL

Secara keseluruhan 33 LRIP terdapat Lembaga yang operasional sebanyak 33 lembaga. Yang dimaksud dengan jumlah fasilitas rehabilitasi milik instansi pemerintah yang operasional adalah lembaga instansi pemerintah yang yang bekerjasama dengan BNNP/BNNK untuk menjalankan layanan rehabilitasi baik rawat jalan maupun rawat inap dan telah memberikan pelayanan rehabilitasi pada klien.

Sedangkan berikut daftar Lembaga Rehabilitasi Komponen Masyarakat (LRKM) yang operasional dan belum operasional pada tahun 2022 :

NO	Satuan Kerja	LRKM YANG TER-SKEP BNN		OPERASIONAL/ BELUM OPERASIONAL
1	BNNP Jawa Timur	1	Ghana Recovery	OPERASIONAL
		2	LRPPN Banyuwangi	OPERASIONAL
		3	KP2M Banyuwangi	OPERASIONAL
		4	Genesa Banyuwangi	OPERASIONAL
		5	Klinik Ghana Prima	OPERASIONAL
2	BNN Kab Malang	6	HMC DAU	OPERASIONAL
3	BNNK Sumenep	7	RSI Garam Kalianget	BELUM OPERASIONAL
4	BNN Kota Mojokerto	8	Rumah Sakit Kamar Medika	OPERASIONAL
5	BNN Kota Surabaya	9	Yayasan Orbit Surabaya	OPERASIONAL
		10	Yayasan Bambu Nusantara Surabaya	OPERASIONAL
		11	Plato Foundation	OPERASIONAL
		12	Yayasan Rumah Bersinar Surabaya	BELUM OPERASIONAL
		13	Yayasan PP Inabah XIX	OPERASIONAL
6	BNNK Tulungagung			
		14	Trisna Health Voluntary Center	OPERASIONAL
7	BNNK Gresik	15	Yayasan Suprisoli	OPERASIONAL
		16	RS Fathma Medika	BELUM OPERASIONAL
8	BNNK Sidoarjo	17	Yayasan Rehabilitasi Korban Narkoba	OPERASIONAL
		18	Yayasan Rumah Kita	BELUM OPERASIONAL
		19	Rumah Merah Putih	OPERASIONAL
		20	yayasan Sahwahita Nusantara	OPERASIONAL
		21	Ponpes Al-Kholiqi Sidoarjo	OPERASIONAL
9	BNNK Blitar	22	Yayasan Tahta Mulia Bina Nusantara	OPERASIONAL
		23	RS An Nisaa'	OPERASIONAL
10	BNN Kota Batu	24	Pondok Pemulihan Doulos Batu	OPERASIONAL
11	BNNK Tuban	25	Klinik Ar Rochma	OPERASIONAL
12	BNN Kota Malang	26	Yayasan Bahrul Maghfiroh Cinta Indonesia	OPERASIONAL
13	BNN Kota Kediri	27	Eklesia Kediri Foundation	OPERASIONAL

Dari data diatas dapat disimpulkan bahwa dari 27 LRKM yang berPKS dengan BNN, terdapat 23 lembaga rehabilitasi komponen masyarakat yang operasional dan sebanyak 4 lembaga belum operasional. Sedangkan yang dimaksud dengan jumlah fasilitas rehabilitasi komponen masyarakat yang operasional adalah lembaga rehabilitasi komponen masyarakat yang bekerjasama dengan BNNP/BNNK untuk menjalankan layanan rehabilitasi baik secara medis maupun sosial baik rawat jalan/rawat inap dan telah melaksanakan layanan rehabilitasi pada klien.

FAKTOR KEBERHASILAN

- a. Banyak lembaga baik LRIP maupun LRKM yang antusias ingin bekerjasama dengan BNN.
- b. Tenaga layanan rehabilitasi sudah terlatih.
- c. Adanya dukungan dari SKPD terkait.

HAMBATAN DAN KENDALA DISERTAI ALTERNATIF SOLUSI

1. Tidak semua lembaga rehabilitasi yg ter-skep BNN operasional (hanya 50% saja yang operasional).
2. Lembaga yang sudah dilatih petugasnya kesulitan mendapatkan klien.
3. Petugas rehabilitasi yang sudah mendapatkan pelatihan telah dimutasi, meninggal ataupun resign.

Alternatif solusi:

- a. BNNP/BNNK membantu lembaga mendapatkan klien dengan merujuk klien ke lembaga tersebut.
- b. BNNP/BNNK aktif melakukan bimbingan teknis kepada Lembaga Rehabilitasi Instansi Pemerintah (LRIP) dan Lembaga Rehabilitasi Komponen Masyarakat (LRKM)

TINDAK LANJUT UNTUK TAHUN BERIKUTNYA

1. BNNP/BNNK lebih selektif dalam mengajukan SKep lembaga.
2. Merekomendasikan kepada lembaga untuk lebih aktif menjangkau klien.

- 8. Sasaran :** Meningkatnya pemetaan jaringan peredaran gelap narkoba dan prekursor narkoba

No.	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian Target (%)
11.	Jumlah jaringan peredaran gelap narkoba dan prekursor narkoba yang berhasil dipetakan	3	4	133

Indikator Kinerja (IKK) Jumlah jaringan peredaran gelap narkoba dan prekursor narkoba yang berhasil dipetakan adalah jumlah lokasi atau wilayah rawan narkoba yang diidentifikasi dalam bentuk operasi informasi intelijen di wilayah Provinsi Jawa Timur.

2020		Nama Jaringan	2021		Nama Jaringan	2022		Nama Jaringan
Target	Realisasi		Target	Realisasi		Target	Realisasi	
3 Laporan	6 Laporan	1. Rusum dan Coleng	2 Laporan	7 Laporan	1. Heri	3 Laporan	4 Laporan	1. Nico Julian
		2. Aldo			2. Bondet			2. Edi
		3. Troike			3. Aceh-Jatim			3. Fajar
		4. Abah Judin			4. Madura			4. Sinta
		5. Rival			5. Bams Abbes			
		6. Rahmat			6. Danen o			
					7. Yunus			

Faktor Keberhasilan:

1. Dukungan sarana dan prasarana yang memadai seperti alat DF (Direction Finder) dan sumber informasi yang dapat dipercaya (A1)
2. Dukungan sumberdaya manusia yang handal
3. Kemudahan akses secara IT

Hambatan dan Kendala:

1. Letak geografis wilayah pemetaan
2. Kultur budaya masyarakat
3. Tingkat pendidikan penduduk yang rendah
4. Belum updatenya peta kerawanan
5. Luasnya wilayah Provinsi Jawa Timur dan masih banyak wilayah yang belum ada BNNK
6. Target beralih ke sosial media dalam melakukan komunikasi

Rekomendasi/ Tindak Lanjut:

1. Terus dilakukan pemantauan terhadap jaringan yang diduga merupakan jaringan peredaran gelap narkoba dan precursor narkoba
2. Melakukan sosialisasi dan koordinasi yang melibatkan semua pihak terkait P4GN
3. Perlunya peremajaan dan pemuktahiran data dan server

9. Sasaran : Meningkatnya pengungkapan tindak pidana narkoba dan lahan tanaman ganja dan tanaman terlarang lainnya

No.	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian Target (%)
12.	Jumlah kasus tindak pidana narkoba yang P-21	25	71	284

**JUMLAH BERKAS PERKARA TINDAK PIDANA NARKOTIKA YANG P21
T.A. 2021 (DIPA)**

NO	SATKER	JUMLAH BERKAS PERKARA P-21	KETERANGAN
1	BNNP Jawa Timur	10	5 Berkas Perkara merupakan berkas perkara yang proses penyidikannya dimulai tahun 2020 yang P21 di Tahun 2021 5 Berkas perkara tahun 2021 belum P21 dan proses penyidikannya dilanjutkan di tahun 2022
2	BNN Kota Surabaya	3	
3	BNN Kab. Sidoarjo	2	1 Berkas perkara tahun 2021 belum P21 dan proses penyidikannya dilanjutkan di tahun 2022
4	BNN Kab. Gresik	4	
5	BNN Kota Mojokerto	4	

6	BNN Kab. Kediri	1	
7	BNN Kab. Tulungagung	1	
8	BNN Kota Kediri	1	
9	BNN Kab. Blitar	1	
10	BNN Kota Batu	2	
11	BNN Kab. Malang	1	
12	BNN Kota Malang	1	
13	BNN Kab. Sumenep	4	
14	BNN Kab. Nganjuk	1	
15	BNN Kab. Tuban	2	
16	BNN Kab. Trenggalek	1	
17	BNN Kab. Pasuruan	1	- 1 Berkas Perkara merupakan berkas perkara dari tahun 2020 yang P21 di Tahun 2021
18	BNN Kab. Lumajang	-	- 1 Berkas perkara tahun 2021 belum P21 dan proses penyidikannya dilanjutkan di tahun 2022
TOTAL		40	

**JUMLAH BERKAS PERKARA TINDAK PIDANA NARKOTIKA YANG P21
T.A. 2021 (HIBAH)**

NO	SATKER	JUMLAH BERKAS PERKARA P-21	KETERANGAN
1	BNN Kab. Sumenep	1	- 3 Berkas perkara tahun 2021 belum P21 dan proses penyidikannya dilanjutkan di tahun 2022

**JUMLAH BERKAS PERKARA TINDAK PIDANA NARKOTIKA YANG P21
T.A. 2022 (DIPA)**

NO	SATKER	JUMLAH BERKAS PERKARA P-21	KETERANGAN
1	BNNP Jawa Timur	19	- 5 Berkas Perkara merupakan berkas perkara yang proses penyidikannya dimulai tahun 2021 yang P21 di Tahun 2022.
2	BNN Kota Surabaya	7	
3	BNN Kab. Sidoarjo	4	- 1 Berkas Perkara merupakan berkas perkara yang proses

			penyidikannya dimulai tahun 2021 yang P21 di Tahun 2022.
4	BNN Kab. Gresik	3	
5	BNN Kota Mojokerto	7	
6	BNN Kab. Kediri	3	
7	BNN Kab. Tulungagung	3	
8	BNN Kota Kediri	2	
9	BNN Kab. Blitar	4	
10	BNN Kota Batu	2	
11	BNN Kab. Malang	1	
12	BNN Kota Malang	2	
13	BNN Kab. Sumenep	3	
14	BNN Kab. Nganjuk	3	
15	BNN Kab. Tuban	2	
16	BNN Kab. Trenggalek	2	
17	BNN Kab. Pasuruan	2	
18	BNN Kab. Lumajang	2	2 Berkas Perkara merupakan berkas perkara yang proses penyidikannya dimulai tahun 2021 yang P21 di Tahun 2022.
TOTAL		71	

**JUMLAH BERKAS PERKARA TINDAK PIDANA NARKOTIKA YANG P21
T.A. 2022 (HIBAH)**

NO	SATKER	JUMLAH BERKAS PERKARA P-21	KETERANGAN
1	BNN Kab. Sumenep	5	3 Berkas Perkara merupakan berkas perkara yang proses penyidikannya dimulai tahun 2021 yang P21 di Tahun 2022.

Faktor Keberhasilan:

1. Komitmen dan kerjasama yang baik antar personel dalam pengungkapan kasus tindak pidana narkoba
2. Dukungan Teknologi Intelijen (TI) yang telah dimiliki oleh BNN dalam pengungkapan kasus tindak pidana narkoba
3. Koordinasi yang baik antar instansi dalam penanganan perkara tindak pidana narkoba

Permasalahan:

1. Kurangnya personel dalam melakukan kegiatan penyelidikan dan penyidikan khususnya personal di BNNK
2. Sarana dan Prasarana untuk mendukung kegiatan yang kurang memadai
3. Lamanya hasil pemeriksaan Labfor Narkotika dan Kloning HP sehingga berpengaruh pada waktu oenyidikan kasus yang sedang ditangani

Rekomendasi/ Tindak Lanjut:

1. Melakukan koordinasi dengan Direktorat Narkotika Deputy Bidang Pemberantasan selaku Pembina fungsi
2. Melakukan koordinasi dengan instansi terkait dalam pengungkapan kasus tindak pidana narkotika

10. Sasaran : Meningkatnya pengungkapan kasus pencucian uang hasil tindak pidana narkotika dan precursor narkotika

No.	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian Target (%)
13	Jumlah berkas perkara tindak pidana pencucian uang hasil tindak pidana narkotika dan prekursor narkotika yang P-21	1	-	-

Yang dimaksud dengan indikator kinerja Jumlah TO kasus tindak pidana narkotika, prekursor narkotika dan TPPU yang tertangkap adalah target pengungkapan kasus yang tindak pidana narkotika dan kasus Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) uang terungkap, pengukuran atas indikator kinerja ini menggunakan jumlah Laporan Kasus Narkotika (LKN) baik kasus tindak pidana narkotika murni maupun TPPU.

Pada tahun 2022 BNNP Jawa Timur menangani 1 Kasus TPPU hasil tindak pidana narkotika, kasus tersebut saat ini masih dalam proses penyidikan dan penyidikannya akan dilanjutkan pada tahun 2023.

Kendala tidak tercapainya target TPPU hasil tindak pidana narkotika adalah pembukaan mutasi rekening perbankan membutuhkan waktu yang relatif lama karena BNNP tidak memiliki kewenangan untuk melakukan pembukaan mutasi rekening sehingga harus melalui Direktorat TPPU BNN, kurangnya SDM penyidik TPPU di BNNP Jawa Timur.

Faktor Keberhasilan:

1. Komitmen dan kerjasama yang baik antar personel dalam pengungkapan kasus tindak pidana pencucian uang hasil tindak pidana narkoba
2. Koordinasi yang baik antar instansi dalam pengungkapan kasus dan penanganan perkara tindak pidana pencucian uang hasil tindak pidana narkoba.

Permasalahan:

1. Pembukaan mutasi rekening perbankan membutuhkan waktu yang relatif lama karena BNNP tidak memiliki kewenangan untuk melakukan pembukaan mutasi rekening sehingga harus melalui Dir TPPU BNN
2. Kurangnya SDM penyidik TPPU di BNNP Jawa Timur

Rekomendasi/Tindak Lanjut:

1. Melakukan koordinasi dengan Direktorat TPPU Bidang Pemberantasan selaku Pembina fungsi
2. Melakukan koordinasi dengan instansi terkait dalam pengungkapan kasus TPPU hasil tindak pidana narkoba

12. Sasaran : Meningkatkan pengawasan tahanan dan barang bukti narkoba

No.	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian Target (%)
15.	Nilai tingkat keamanan, ketertiban dan kesehatan tahanan	100	100	100

Pengawasan tahanan dan barang bukti adalah upaya untuk mengidentifikasi dan menganalisis perhitungan tindak pidana narkoba serta pendataan barang bukti tindak pidana narkoba. Sasaran meningkatnya pengawasan tahanan dan barang bukti narkoba merupakan optimalisasi pengawasan tahanan dan barang bukti baik barang bukti narkoba maupun non narkoba.

Dari sasaran kinerja diatas maka dituangkan menjadi indikator nilai tingkat keamanan, ketertiban dan kesehatan tahanan dan nilai tingkat keamanan barang bukti narkoba dan non narkoba.

Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) Nilai tingkat keamanan, ketertiban dan kesehatan tahanan adalah ukuran keberhasilan dalam menjaga keamanan, ketertiban dan kesehatan tahanan, pada Tahun 2022 tahanan pada BNN Provinsi Jawa Timur sebanyak 76 orang tersangka.

Selama Tahun 2022 tidak terjadi gangguan yang berarti terhadap tahanan baik pada keamanannya dan juga ketertiban tahanan, dalam menjaga kesehatan tahanan, Klinik Pratama BNN Provinsi Jawa Timur rutin memeriksa kesehatan tahanan untuk memastikan tahanan dalam keadaan sehat, selain pemeriksaan Kesehatan BNNP Jawa Timur juga rutin melakukan kegiatan Bimbingan Rohani dan Mental kepada tahanan BNNP Jawa Timur.

No.	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian Target (%)
16.	Nilai tingkat keamanan barang bukti narkoba dan non narkoba	100	100	100

Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) Nilai tingkat keamanan barang bukti narkoba dan non narkoba merupakan upaya mengamankan dan menjaga barang bukti narkoba dan non narkoba, pada tahun 2020, barang bukti narkoba berupa Sabu 20.077,99 gram, ekstasi 77 butir, ganja 6886 gram dan tembakau gorilla 9,79 gram. Sedangkan pada tahun 2021 barang bukti narkoba berupa Sabu 10.071,456 gram, dan ganja 11.464,95 gram.

JUMLAH TERSANGKA DAN BARANG BUKTI NARKOTIKA T.A. 2022 (DIPA)

NO.	SATKER	JUMLAH TERSANGKA	JUMLAH BB NARKOTIKA		
			SABU (gr)	EKSTASI (butir)	GANJA (gr)
1	BNNP Jawa Timur	16	1924,83	-	19804,28
2	BNN Kota Surabaya	7	69,32	-	-
3	BNN Kab. Sidoarjo	3	1,62	-	3625
4	BNN Kab. Gresik	5	6,74	-	3076
5	BNN Kota Mojokerto	7	34,3	-	-
6	BNN Kab. Kediri	3	10,08	-	-
7	BNN Kab. Tulungagung	3	1,99	-	-
8	BNN Kota Kediri	3	5,85	-	-
9	BNN Kab. Blitar	4	11,44	-	-
10	BNN Kota Batu	2	-	-	1011,8
11	BNN Kab. Malang	1	2,23	-	6236,61
12	BNN Kota Malang	3	0,67	-	16,08
13	BNN Kab. Sumenep	3	14,94	-	-
14	BNN Kab. Nganjuk	5	1,64	-	2555
15	BNN Kab. Tuban	3	53,67	-	1,1
16	BNN Kab. Trenggalek	2	1,65	-	-
17	BNN Kab. Lumajang	-	-	-	-
18	BNN Kab. Pasuruan	3	51,35	-	-
TOTAL		73	2192,32	-	36325,87

JUMLAH TERSANGKA DAN BARANG BUKTI NARKOTIKA T.A. 2022 (HIBAH)

NO.	SATKER	JUMLAH TERSANGKA	JUMLAH BB NARKOTIKA		
			SABU (gr)	EKSTASI (butir)	GANJA (gr)
1	BNNK Sumenep	3	2015	-	-
TOTAL		3	2015	-	-

JUMLAH TERSANGKA DAN BARANG BUKTI TPPU HASIL TINDAK PIDANA NARKOTIKA T.A. 2022 (DIPA)

NO.	SATKER	JUMLAH TERSANGKA	BARANG BUKTI
1	BNNP Jawa Timur	1	1. Sebidang tanah yang diatasnya berdiri sebuah bangunan rumah di Desa Samapuin Kab. Sumbawa NTB 2. Uang dalam Rekening senilai Rp. 10.600.000,-.

Pecandu Narkotika dan Korban Penyalahgunaan Narkotika yang tanpa hak dan melawan hukum sebagai Tersangka penyalahgunaan Narkotika yang ditangkap atau tertangkap tangan tanpa barang bukti Narkotika dan terbukti positif menggunakan Narkotika sesuai dengan hasil tes urine, darah, dan/atau rambut, ditempatkan di Lembaga rehabilitasi yang dikelola oleh pemerintah setelah dibuatkan Berita Acara Pemeriksaan Hasil Laboratorium dan Berita Acara Pemeriksaan oleh Penyidik dan telah dilengkapi dengan rekomendasi hasil asesmen Tim Asesmen Terpadu. Tim Asesmen Terpadu mempunyai tugas untuk melakukan:

- a. Asesmen dan analisis medis, psikososial, serta merekomendasi rencana terapi dan rehabilitasi seseorang yang ditangkap dan/atau tertangkap tangan.
- b. Analisis terhadap seseorang yang ditangkap dan/atau tertangkap tangan dalam kaitan peredaran gelap Narkotika dan penyalahgunaan Narkotika.

Selama Tahun 2022 BNNP Jawa Timur dan BNN Kab./Kota Jajaran melaksanakan Asesmen Terpadu terhadap 1383 Orang, dengan rincian sebagai berikut:

NO	SATKER	JUMLAH ASESMEN
1	BNNP Jawa Timur	785
2	BNN Kota Surabaya	246
3	BNN Kab. Sidoarjo	25
4	BNN Kab. Gresik	28
5	BNN Kota Mojokerto	30

6	BNN Kab. Kediri	20
7	BNN Kab. Tulungagung	5
8	BNN Kab. Blitar	30
9	BNN Kota Batu	9
10	BNN Kab. Sumenep	35
11	BNN Kab. Tuban	10
12	BNN Kab. Nganjuk	34
13	BNN Kab. Malang	14
14	BNN Kota Malang	9
15	BNN Kota Kediri	32
16	BNN Kab. Pasuruan	44
17	BNN Kab. Lumajang	5
18	BNN Kab. Trenggalek	22
JUMLAH		1383

Faktor Keberhasilan:

1. Sudah adanya register barang bukti narkoba dan non narkoba
2. Anggaran makan tahanan dan pemeriksaan kesehatan tahanan yang mencukupi

Permasalahan:

1. Kurangnya jumlah CCTV pada ruang penyimpanan barang bukti
2. Kurangnya sarana dan prasarana printer/mesin FC untuk mempermudah pelaksanaan admininstrasi penyimpanan BB narkoba maupun narkoba

Rekomendasi / Tindak Lanjut:

1. Permohonan pengadaan CCTV dan mesin foto copy melalui anggaran hibah Pemerintah Provinsi Jawa Timur

12.	Sasaran : Terselenggaranya proses manajemen kinerja yang efektif dan efisien			
No.	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian Target (%)
17.	Nilai Kinerja Anggaran BNN Provinsi Jawa Timur	87	87.42	100,48 %

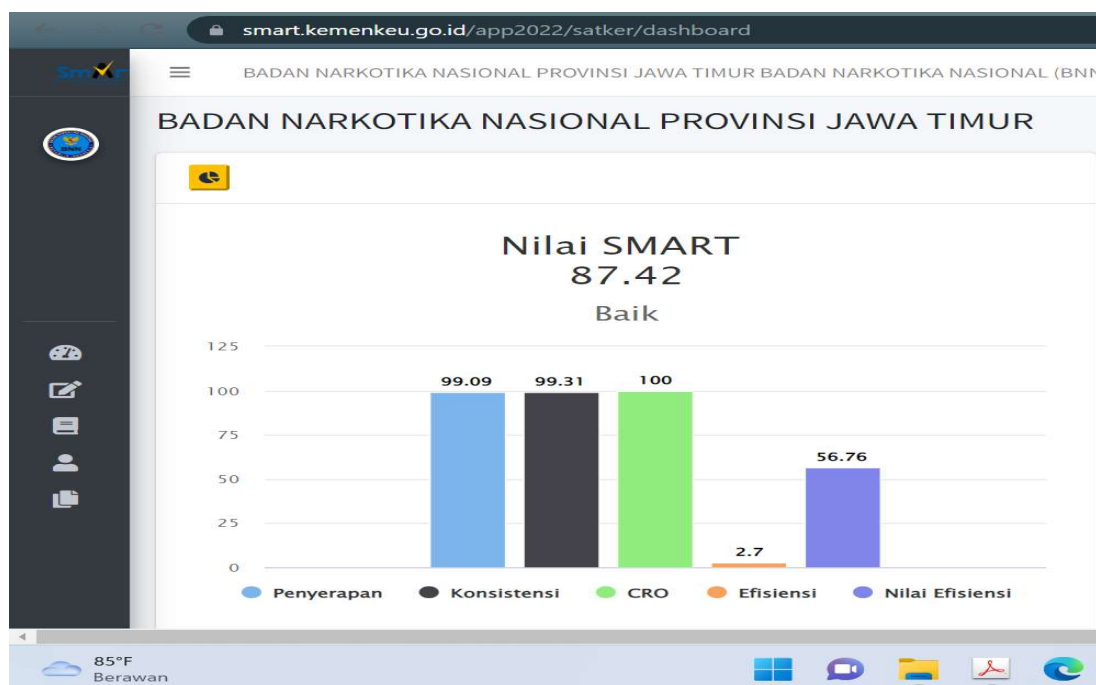
Manajemen kinerja efektif dan efisien merupakan upaya untuk mendukung Good Governance, manajemen kinerja yang baik merupakan instrument untuk mendapatkan hasil-hasil yang lebih baik dari organisasi dengan didukung pengelolaan kinerja sesuai

tujuan, sasaran dan standar yang ditetapkan mulai dari proses perencanaan hingga monitoring dan evaluasi.

Sasaran kinerja terselenggaranya proses manajemen kinerja yang efektif dan efisien ini dituangkan dalam Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) sebagai berikut:

Capaian nilai kinerja anggaran BNN didapat dari beberapa aspek implementasi yang meliputi beberapa kategori antara lain penyerapan anggaran, konsistensi antara perencanaan dengan implementasi, capaian keluaran dan efisiensi serta capaian manfaat.

Capaian nilai kinerja anggaran BNNP Jawa Timur dapat dijelaskan pada gambar berikut ini:



Dengan rincian perhitungan sebagai berikut:

Indikator	Bobot	Capaian Indikator	Capaian Tertimbang
Capaian Rincian Output	43.50%	100%	43.50%
Nilai Efisiensi	28.60%	56.76%	16.23%
Konsistensi Penyerapan Anggaran	18.20%	99.31%	18.07%
Penyerapan Anggaran	9.70%	99.09%	9.61%
CAPAIAN SMART DJA			87.42 %

Hambatan dan Kendala:

Pada tahun anggaran 2022 ini, BNNP Jawa Timur mencapai nilai target kinerja anggaran yang telah diperjanjikan pada PK T.A. 2022 yaitu 87. Bobot indikator yang paling besar adalah CRO, karena BNNP Jawa Timur memiliki 1 target TPPU yang tidak tercapai. Capaian indikator nilai efisiensi juga kecil dikarenakan pelaksanaan anggaran, dalam hal ini penggunaan digunakan dianggap kurang efisien, sehingga hanya mencapai 2.7%.

Faktor Keberhasilan:

1. Adanya sinergi yang baik sehingga capaian output dapat tercapai dengan baik.
2. Adanya Automatic Adjustment sehingga realisasi anggaran bisa mencapai 99.09%.

No.	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian Target (%)
18.	Jumlah BNN Kabupaten/ Kota di wilayah provinsi dengan Nilai Kinerja Anggaran mencapai target	17	9	52.94%

NO.	SATUAN KERJA	PAGU ANGGARAN	REALISASI ANGGARAN	%	IKPA	NKA
1	BNN KOTA MOJOKERTO	1,756,528,000	1,756,514,882	100.00%	96.99	88.34
2	BNN KAB KEDIRI	1,752,223,000	1,751,936,475	99.98%	99.98	89.04
3	BNN KAB SIDOARJO	2,172,176,000	2,171,503,296	99.97%	97.17	85.52
4	BNN KAB TUBAN	1,941,706,000	1,936,948,840	99.76%	100.00	89.85
5	BNN KAB TULUNGAGUNG	2,057,828,000	2,050,848,267	99.66%	98.87	86.11
6	BNN KAB TRENGGALEK	2,067,884,000	2,059,193,766	99.58%	98.61	87.24
7	BNN KOTA SURABAYA	2,007,535,000	1,999,066,529	99.58%	98.56	86.87
8	BNN KAB BLITAR	1,856,527,000	1,844,974,529	99.38%	96.40	89.22
9	BNN KAB MALANG	2,036,226,000	2,021,508,328	99.28%	97.71	86.27
10	BNN KOTA MALANG	1,894,921,000	1,879,919,382	99.21%	97.79	86.45
11	BNNP JAWA TIMUR	20,843,826,000	20,654,378,336	99.09%	97.72	87.42
12	BNN KAB NGANJUK	1,900,313,000	1,881,472,022	99.01%	99.01	86.45
13	BNN KAB GRESIK	1,901,606,000	1,882,563,236	99.00%	97.43	86.75
14	BNN KAB SUMENEP	1,764,477,000	1,743,387,249	98.80%	89.01	87.69

15	BNN KOTA BATU	1,909,820,000	1,882,032,205	98.55%	92.20	85.80
16	BNN KOTA KEDIRI	2,033,901,000	2,000,133,041	98.34%	98.24	88.10
17	BNN KAB PASURUAN	1,748,933,000	1,713,882,513	98.00%	96.14	86.67
18	BNN KAB LUMAJANG	1,772,495,000	1,712,375,966	96.61%	96.20	88.00

Dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan pengelolaan APBN oleh BNNP Jawa Timur dan Jajaran BNNKab/Kota masih belum optimal dimana kinerja anggaran rata-rata 87.43 dan hanya 9 satker yang mencapai target NKA 87. Berdasarkan hasil evaluasi internal hal-hal yang menyebabkan belum optimalnya pelaksanaan tersebut antara lain adalah:

1. Kurangnya koordinasi dan kerjasama antar seksi dan subbag untuk merealisasikan serapan anggaran yang telah dilaksanakan sesuai timeline yang ditetapkan,
2. Masih lemahnya kompetensi Sumber Daya Manusia yang dimiliki, sehingga pencapaian output yang diharapkan belum dapat tercapai dengan baik

Adapun langkah perbaikan yang akan diambil untuk memperbaiki hal tersebut khususnya meningkatkan serapan anggaran dan realisasi capaian output antara lain adalah:

1. Meningkatkan mutu perencanaan karena dengan perencanaan yang matang maka sasaran yang telah ditetapkan akan dapat dicapai
2. Mengajukan penambahan jumlah personil untuk dapat menyelesaikan semua sasaran yang ditetapkan sesuai dengan apa yang telah direncanakan
3. Meningkatkan kompetensi Sumber Daya Manusia yang dimiliki dengan mengikut sertakan dalam pelatihan-pelatihan pengembangan kapasitas dan kompetensi.

13. Sasaran : Meningkatnya tata kelola administrasi keuangan yang sesuai prosedur

No.	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian Target (%)
19.	Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran BNN Provinsi Jawa Timur	95	97.46	102.5 %



INDIKATOR PELAKSANAAN ANGGARAN

Sampai Dengan : DESEMBER

No	Kode KPPN	Kode BA	Kode Satker	Uraian Satker	Keterangan	Kualitas Perencanaan Anggaran		Kualitas Pelaksanaan Anggaran					Kualitas Hasil Pelaksanaan Anggaran	Nilai Total	Konversi Bobot	Nilai Akhir (Nilai Total/Konversi Bobot)
						Revisi DIPA	Deviasi Halaman III DIPA	Penyerapan Anggaran	Belanja Kontraktual	Penyelesaian Tagihan	Pengelolaan UP dan TUP	Dispensasi SPM	Capaian Output			
1	031	066	682480	BADAN NARKOTIKA NASIONAL PROVINSI JAWA TIMUR	Nilai	100.00	80.38	99.25	0.00	100.00	98.79	100.00	99.80	87.72	90%	97.46
					Bobot	10	10	20	0	10	10	5	25			
					Nilai Akhir	10.00	8.04	19.85	0.00	10.00	9.88	5.00	24.95			
					Nilai Aspek	90.19		99.51					99.80			
Disclaimer: Sesuai Perdirjen Perbendaharaan PER-5/PB/2022 indikator Revisi DIPA dan Penyerapan Anggaran tidak dihitung di Triwulan I 2022																

Dapat dilihat pada tabel perhitungan nilai IKPA di atas terlihat bahwa Deviasi Halaman III DIPA, Penyerapan Anggaran dan Pengelolaan UP yang nilainya belum sempurna, sehingga diharapkan untuk periode selanjutnya dapat ditingkatkan kinerja pelaksanaannya., dengan cara sebagai berikut:

1. Mengevaluasi SOP pengelolaan UP, apakah sudah dilaksanakan dengan baik dan sesuai dengan perhitungan waktu.
2. Mengevaluasi kembali terkait SPM, apakah sudah sesuai dengan SOP dan petakan permasalahan mengapa adanya penolakan SPM.
3. Mengevaluasi kegiatan apakah sudah dilaksanakan sesuai dengan RPD dan Timeline yang sudah dibuat. Mengingatkan kembali kepada bidang/ bagian untuk komitmen dan konsisten dengan RPD yang sudah dibuat.
4. Evaluasi mengapa masih ada Capaian Output yang tidak tercapai. Diharapkan agar untuk periode selanjutnya Capaian Output yang ditargetkan bisa tercapai.

No.	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian Target (%)
20.	Jumlah BNN Kabupaten/ Kota di wilayah provinsi dengan Nilai IKPA mencapai target	17	15	88.23 %

Dilihat pada tabel di atas, ada 2 (dua) satker BNN Kabupaten/Kota yang tidak mencapai target nilai IKPA pada T.A. 2022, yaitu BNN Kabupaten Sumenep dan BNN Kota Batu. Sebagai bahan evaluasi kedepannya akan dilakukan pembinaan lebih lanjut dengan monitoring perencanaan dan penganggaran di T.A. 2023 agar kinerja satker meningkat.

B. Realisasi Anggaran BNNP Jawa Timur dan BNN Kabupaten /Kota T.A. 2022

Berikut adalah realisasi penyerapan anggaran untuk BNNP Jawa Timur beserta jajaran untuk Tahun 2022 :

NO.	SATUAN KERJA	PAGU ANGGARAN	REALISASI ANGGARAN	%
1	BNN KOTA MOJOKERTO	1,756,528,000	1,756,514,882	100.00%
2	BNN KAB KEDIRI	1,752,223,000	1,751,936,475	99.98%
3	BNN KAB SIDOARJO	2,172,176,000	2,171,503,296	99.97%
4	BNN KAB TUBAN	1,941,706,000	1,936,948,840	99.76%
5	BNN KAB TULUNGAGUNG	2,057,828,000	2,050,848,267	99.66%
6	BNN KAB TRENGGALEK	2,067,884,000	2,059,193,766	99.58%
7	BNN KOTA SURABAYA	2,007,535,000	1,999,066,529	99.58%
8	BNN KAB BLITAR	1,856,527,000	1,844,974,529	99.38%
9	BNN KAB MALANG	2,036,226,000	2,021,508,328	99.28%
10	BNN KOTA MALANG	1,894,921,000	1,879,919,382	99.21%
11	BNNP JAWA TIMUR	20,843,826,000	20,654,378,336	99.09%
12	BNN KAB NGANJUK	1,900,313,000	1,881,472,022	99.01%
13	BNN KAB GRESIK	1,901,606,000	1,882,563,236	99.00%
14	BNN KAB SUMENEP	1,764,477,000	1,743,387,249	98.80%
15	BNN KOTA BATU	1,909,820,000	1,882,032,205	98.55%
16	BNN KOTA KEDIRI	2,033,901,000	2,000,133,041	98.34%
17	BNN KAB PASURUAN	1,748,933,000	1,713,882,513	98.00%
18	BNN KAB LUMAJANG	1,772,495,000	1,712,375,966	96.61%

Sumber
data :
aplikasi
omspan

BAB IV PENUTUP

A. KESIMPULAN

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Badan Narkotika Nasional Provinsi Jawa Timur 2022 merupakan wujud pertanggungjawaban pelaksanaan tugas pokok dan fungsi, kebijakan, program, dan kegiatan BNNP Jawa Timur sebagai pelayanan publik. Secara umum dapat disimpulkan bahwa BNNP Jawa Timur telah dapat merealisasikan berbagai kegiatan melalui Program Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba sebagaimana yang ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja. Pada T.A. 2022 anggaran yang diterima oleh BNNP Jawa Timur dan BNNK jajaran senilai Rp. 53.418.925.000 (Lima puluh tiga miliar empat ratus delapan belas juta Sembilan ratus dua puluh lima ribu rupiah) terealisasi sebesar **Rp. 52.942.638.862 (Lima puluh dua miliar sembilan ratus empat puluh dua juta enam ratus tiga puluh delapan ribu delapan ratus enam puluh dua rupiah)**, atau sebesar **99.11 %**.

B. SARAN

Untuk meningkatkan kinerja Badan Narkotika Nasional Provinsi Jawa Timur, dari hasil pengukuran dan evaluasi kinerja pencapaian sasaran dan kegiatan, saran-saran yang dapat disampaikan sebagai masukan antara lain sebagai berikut:

1. Perlu adanya penambahan personil yang permanen untuk mendukung operasional kegiatan dalam rangka pelaksanaan kegiatan P4GN.
2. Meningkatkan bentuk-bentuk pengawasan/monitoring yang efektif terhadap pelaksanaan kegiatan yang sudah direncanakan, baik internal maupun dengan melibatkan pihak-pihak terkait, dengan muatan pembinaan, dan bukan evaluasi saja.
3. Lebih memaksimalkan peran media cetak, media online/media sosial dan media luar ruang sebagai sarana penyebaran informasi P4GN.
4. Dalam meningkatkan peran serta masyarakat perlu diadakan upaya seperti pemberian apresiasi dan pembinaan yang berkelanjutan kepada penggiat anti narkoba
5. Dengan pelaksanaan program rehabilitasi yang berjangka dan berkelanjutan, sebaiknya telah mempersiapkan bahan seperti regulasi, perjanjian kerjasama, petunjuk teknis, pengadaan barang/jasa sehingga pelaksanaan program rehabilitasi dapat dilaksanakan sejak awal tahun.

6. Optimalisasi IT dan mengupgrade peralatan intelijen sesuai dengan perkembangan teknologi dan semakin menjalin kerjasama dengan para penegak hukum termasuk sharing informasi.



**PERJANJIAN KINERJA
BADAN NARKOTIKA NASIONAL PROVINSI JAWA TIMUR
TAHUN 2022**

Dalam rangka manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi kepada hasil, yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Drs. MOHAMAD ARIS PURNOMO
Jabatan : KEPALA BNN PROVINSI JAWA TIMUR

selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : Dr. PETRUS R. GOLOSE
Jabatan : KEPALA BADAN NARKOTIKA NASIONAL

selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Bogor, 07 Maret 2022

Pihak Kedua,
KEPALA
BADAN NARKOTIKA NASIONAL


Dr. PETRUS R. GOLOSE

Pihak Pertama,
KEPALA BNN PROVINSI
JAWA TIMUR

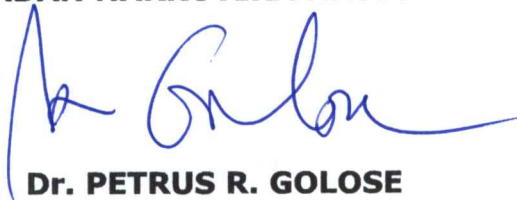

Drs. MOHAMAD ARIS PURNOMO

Uang Hasil Tindak Pidana Narkotika

- | | |
|---|-------------------|
| 12. Kegiatan Pembinaan Administrasi dan Pengelolaan Keuangan | Rp.15.921.105.000 |
| 13. Kegiatan Pengembangan Organisasi, Tatalaksana, dan Sumber Daya Manusia | Rp.438.648.000 |
| 14. Kegiatan Penyusunan dan Pengembangan Rencana Program dan Anggaran BNN | Rp.579.066.000 |
| 15. Kegiatan Penyelenggaraan Ketatausahaan, Rumah Tangga dan Pengelolaan Sarana dan Prasarana | Rp.21.989.913.000 |
| 16. Kegiatan Penyelenggaraan Kehumasan dan Keprotokolan | Rp.419.660.000 |

Pihak Kedua,

**KEPALA
BADAN NARKOTIKA NASIONAL**



Dr. PETRUS R. GOLOSE

Bogor, 07 Maret 2022

Pihak Pertama,

**KEPALA BNN PROVINSI
JAWA TIMUR**



Drs. MOHAMAD ARIS PURNOMO

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022
BADAN NARKOTIKA NASIONAL PROVINSI JAWA TIMUR

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
1	2	3	4
1	Meningkatnya daya tangkal anak dan remaja terhadap pengaruh buruk penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika	Jumlah kabupaten/kota dengan Indeks Ketahanan Diri Remaja Terhadap Penyalahgunaan Narkoba berkategori "Tinggi" di wilayah provinsi	17 Kabupaten/Kota
2	Meningkatnya daya tangkal keluarga terhadap pengaruh buruk penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika	Jumlah kabupaten/kota dengan Indeks Ketahanan Keluarga Terhadap Penyalahgunaan Narkoba berkategori "Tinggi" di wilayah provinsi	17 Kabupaten/Kota
3	Meningkatnya kesadaran dan kepedulian masyarakat dalam penanganan P4GN	Jumlah kabupaten/kota dengan Indeks Kemandirian Partisipasi berkategori "Mandiri" di wilayah provinsi	17 Kabupaten/Kota
4	Meningkatnya upaya pemulihan kawasan atau wilayah rawan narkoba secara berkelanjutan	Jumlah kawasan rawan di wilayah provinsi yang beralih status dari "Bahaya" menjadi "Waspada"	2 Kawasan
5	Meningkatnya upaya pemulihan kawasan atau wilayah rawan narkoba secara berkelanjutan	Nilai Keterpulihan Kawasan Rawan Yang diintervensi	2.75 Indeks
6	Meningkatnya kapasitas tenaga teknis rehabilitasi	Jumlah petugas penyelenggara layanan IBM yang terlatih	94 Orang
7	Meningkatnya kapasitas tenaga teknis rehabilitasi	Jumlah petugas Rehabilitasi yang tersertifikasi kompetensi teknis	5 Orang
8	Meningkatnya aksesibilitas dan kemampuan fasilitas layanan rehabilitasi narkotika	Jumlah lembaga rehabilitasi yang memenuhi Standar Pelayanan Minimal (SPM) di wilayah provinsi	10 Lembaga
9	Meningkatnya aksesibilitas dan kemampuan fasilitas layanan rehabilitasi narkotika	Jumlah unit penyelenggara layanan rehabilitasi Intervensi Berbasis Masyarakat (IBM) di wilayah provinsi	19 Unit
10	Meningkatnya kualitas layanan rehabilitasi narkotika di Klinik Rehabilitasi	Indeks kepuasan layanan klinik rehabilitasi	3.40 Indeks

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
11	Meningkatnya pemetaan jaringan sindikat peredaran gelap narkoba dan prekursor narkoba	Jumlah jaringan peredaran gelap narkoba dan prekursor narkoba yang berhasil dipetakan	1 Peta Jaringan
12	Meningkatnya pengungkapan tindak pidana narkoba dan lahan tanaman ganja dan tanaman terlarang lainnya	Jumlah berkas perkara tindak pidana narkoba dan prekursor narkoba yang P-21	25 Berkas Perkara
13	Meningkatnya pengawasan tahanan dan barang bukti narkoba	Nilai Tingkat Keamanan, Ketertiban, dan Kesehatan Tahanan	100 Indeks
14	Meningkatnya pengawasan tahanan dan barang bukti narkoba	Nilai tingkat keamanan barang bukti narkoba dan non narkoba	100 Indeks
15	Meningkatnya pengungkapan kasus pencucian uang hasil tindak pidana narkoba dan prekursor narkoba	Jumlah berkas perkara tindak pidana pencucian uang (TPPU) hasil tindak pidana narkoba dan prekursor narkoba yang P-21	1 Berkas Perkara
16	Meningkatnya proses manajemen kinerja secara efektif dan efisien	Nilai Kinerja Anggaran	87 Indeks
17	Meningkatnya proses manajemen kinerja secara efektif dan efisien	Jumlah BNN Kabupaten/Kota di wilayah provinsi dengan NKA mencapai target	17 Kabupaten/Kota
18	Meningkatnya tata kelola administrasi keuangan yang sesuai prosedur	Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA)	95 Indeks
19	Meningkatnya tata kelola administrasi keuangan yang sesuai prosedur	Jumlah BNN Kabupaten/Kota di wilayah provinsi dengan Nilai IKPA mencapai target	17 Kabupaten/Kota

1. Kegiatan Pengelolaan Informasi dan Edukasi	Rp.1.486.400.000
2. Kegiatan Penyelenggaraan Advokasi	Rp.2.264.000.000
3. Kegiatan Pemberdayaan Peran serta Masyarakat	Rp.3.932.425.000
4. Kegiatan Penyelenggaraan Pemberdayaan Alternatif	Rp.298.700.000
5. Kegiatan Penguatan Lembaga Rehabilitasi Instansi Pemerintah	Rp.409.199.000
6. Kegiatan Penguatan Lembaga Rehabilitasi Komponen Masyarakat	Rp.2.036.095.000
7. Kegiatan Pascarehabilitasi Penyalah guna dan/atau Pecandu Narkoba	Rp.261.727.000
8. Kegiatan Pelaksanaan Intelijen Berbasis Teknologi	Rp.150.000.000
9. Kegiatan Penyidikan Jaringan Peredaran Gelap Narkoba	Rp.1.400.000.000
10. Kegiatan Pengawasan Tahanan dan Barang Bukti	Rp.1.184.975.000
11. Kegiatan Penyidikan Tindak Pidana Pencucian	Rp.210.000.000